

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**ADILLAH MIFTAHUL NI'MAH**  
**NIM. 214105030039**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2025**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
**ADILLAH MIFTAHUL NI'MAH**  
NIM. 214105030039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2025**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**ADILLAH MIFTAHUL NI'MAH**  
**NIM. 214105030039**



Disetujui Pembimbing  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Dr. Hj NURUL SETIANINGRUM, S.E., M.M**  
**NIP. 196905231998032001**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Maret 2025

Tima Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.  
NIP. 1988092322019032012

  
H. Muzayyin, S.E.I., M.E.  
NIP. 197808142023211011

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M


Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (Al-Isra: 36)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> “Surat Al-Isra’ Ayat 36: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed January 21, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan karunia-nya, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga karya ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Mohamad Jidni, terima kasih atas semua pengorbanannya dan tulus kasih yang selalu menjadi bagian dalam perjalanan untuk memperjuangkan pendidikan. Namun, beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga dapat menyelesaikan pendidikannya sampai menyandang gelar sarjana.
2. Malaikat tak bersayap dan pintu surgaku, Ibunda Sulastris Handayani, terima kasih sudah menjadi peran penting dalam proses menyelesaikan pendidikan ini pengorbanan, nasihat, dan motivasi serta do'a yang selalu beliau panjatkan untuk diriku. Namun, beliau tidak berhenti memberikan semangat dan selalu mendampingi dan mendukung setiap langkahku hingga aku berada di titik sekarang ini.
3. Saudara kandungku Mohamad Daka Maulan Syaif dan Adiba Lailatul Ramadani yang selalu menemani dan menyemangati dalam proses menyelesaikan pendidikan ini, serta yang selalu menghibur saya dikala saya pusing mengerjakan.
4. Kepada saudaraku mbak Risa dan mas Yudi yang selalu membantu, membimbing dan memberikan arahan untuk pengerjaan skripsi ini, dan menyemangati saya dalam menyelesaikan proses pendidikan ini.

5. Seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan semangat serta memberikan contoh yang terbaik.
6. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku dosen pembimbing, terimakasih telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat terbaik saya dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu Ike Nurjanna yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan hingga selesai dan tak pernah henti saling menyemangati.
8. Teman-teman dekat devi dan intan yang selalu memberikan semangat mulai dari dibangku perkuliahan hingga proses menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh anggota kelas Akuntansi Sayariah V 2021 yang menjadi teman seperjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana.
10. Kepada seseorang yang sedang bersama penulis, terimakasih atas segala hal yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Hadirnya anda di kehidupan ini memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian tugas akhir ini, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
12. Dan yang terakhir teruntuk saya sendiri Adillah Miftahul Ni'mah perempuan kuat dan luar biasa. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya yang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati semua lika-liku dalam kehidupan ini.

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya terhadap perencanaan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul *“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi”* dapat terselesaikan dengan lancar. Penulisan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana yang diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan keberhasilan penulisan skripsi ini tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku koordinator program studi Akuntansi Syariah.

5. Dr. Sofiah, M.E selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
6. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku dosen pembimbing, terima kasih selalu sabar dan meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat memhami apa yang telah tidak diketahuinya.
8. Segenap seluruh karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan jawaban terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Segenap seluruh yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat pada pembacanya atau untuk penelitian selanjutnya.



Jember, 15 Januari 2025

Adillah Miftahul Ni'mah  
NIM. 214105030039

## ABSTRAK

**Adillah Miftahul Ni'mah, Nurul Setianingrum, 2024:** *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.*

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber daya keuangan daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kerja internal daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi sumber pendapatan dari dalam daerah, serta kontribusi dari aktivitas jumlah penduduk tersebut.

Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah: 1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi? 2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi? 3) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi? 4) Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara parsial dan simultan hubungan pengaruh variabel-variabel pada penelitian ini yang telah dirumuskan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019-2023 dan hasil sensus jumlah penduduk tahun 2019-2023. Sampel yang digunakan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis dapat menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan variabel independen (variabel bebas) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR ISI

|                                     | Hal  |
|-------------------------------------|------|
| COVER .....                         |      |
| HALAMAN SAMPUL .....                | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....             | iii  |
| MOTTO .....                         | iv   |
| PERSEMBAHAN .....                   | v    |
| KATA PENGANTAR .....                | vii  |
| ABSTRAK .....                       | ix   |
| DAFTAR ISI .....                    | x    |
| DAFTAR TABEL .....                  | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                 | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....             | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....     | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....            | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....          | 9    |
| D. Manfaat Penelitian .....         | 10   |
| E. Runag Lingkup Penelitian .....   | 11   |
| 1. Variabel Penelitian .....        | 11   |
| 2. Indikator Penelitian .....       | 12   |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| F. Definisi Operasional .....                   | 13        |
| G. Asumsi Penelitian .....                      | 15        |
| H. Kerangka Berfikir .....                      | 16        |
| I. Hipotesis .....                              | 18        |
| J. Sistematika Pembahasan .....                 | 19        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>              | <b>21</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                   | 21        |
| B. Kajian Teori .....                           | 34        |
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....           | 34        |
| 2. Pajak Daerah .....                           | 41        |
| 3. Retribusi Daerah .....                       | 44        |
| 4. Jumlah Penduduk .....                        | 47        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>49</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 49        |
| B. Populasi dan Sampel .....                    | 50        |
| C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....  | 51        |
| D. Analisis Data .....                          | 53        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>60</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....              | 60        |
| B. Penyajian Data .....                         | 67        |
| C. Analisis dan Pengujian Hipotesis .....       | 74        |
| D. Pembahasan .....                             | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>87</b> |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| A. Simpulan .....           | 87        |
| B. Saran-Saran .....        | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>89</b> |

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian
3. Angket Penelitian
4. Surat Keterangan Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Hasil Perhitungan SPSS Data Sekunder
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
10. Biodata Penulis



## DAFTAR TABEL

|                                                                                             | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Sekar Kijang.....                    | 5   |
| 1.2. Data Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021-2023 .....                             | 5   |
| 1.3. Perbandingan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk ...                   | 6   |
| 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian<br>yang dilakukan ..... | 32  |
| 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi .....                             | 62  |
| 4.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk hasil Proyeksi<br>Penduduk ..... | 65  |
| 4.3. Uji Statistik Deskriptif .....                                                         | 67  |
| 4.4. Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov Smirnov .....                                   | 69  |
| 4.5. Uji Multikolinearitas .....                                                            | 71  |
| 4.6. Uji Autokorelasi – Runs Test .....                                                     | 73  |
| 4.7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....                                                | 74  |
| 4.8. Uji Parsial (t) .....                                                                  | 77  |
| 4.9. Uji Simultan (f) .....                                                                 | 79  |
| 4.10. Koefisien Determinasi .....                                                           | 80  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                           | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. Perbandingan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk .... | 7   |
| 1.2. Kerangka Berfikir .....                                              | 17  |
| 2.1. Alur Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                              | 38  |
| 4.1. Grafik Scatterplot .....                                             | 72  |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini pertumbuhan perekonomian di suatu negara mengalami perubahan setiap periode tertentu. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Peran pemerintah menjadi hal yang dibutuhkan terhadap pemecahan suatu masalah dalam meningkatnya biaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah pada bidang pembangunan dan kemasyarakatan.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari tinggi rendahnya suatu pendapatan riil pada suatu daerah. Pada pertumbuhan ekonomi ini berarti dapat berkembang jika, pertambahan jumlah produksi barang dan jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Sumber daya keuangan daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kerja internal daerah. Faktor keuangan daerah ini dalam menjalankan otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan suatu daerah, sehingga dengan faktor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

---

<sup>2</sup> Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, and Natassia Widjaja, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022" 5, no. 2 (2024): 7043–53.

<sup>3</sup> Moh Khusaini, *Keuangan Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2018), 02–04.

Optimalisasi keuangan daerah ini menjadi potensi pemerintah daerah dalam rangka menopang terselenggaranya urusan pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh asas otonomi daerah. Pada pendapatan asli daerah termasuk penggalan potensi terhadap sumber daya yang dimiliki suatu daerah.<sup>4</sup> Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Pada Kabupaten Banyuwangi ini untuk menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur daerahnya dan perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD). Sehingga pada pendapatan asli daerah yang menjadi pendorong untuk keperluan pengeluaran guna memperoleh keuangan yang berasal dari dalam daerah.

Pendapatan asli daerah termasuk elemen penting untuk menjalankan dan memenuhi pembangunan bagi pemerintahan daerah, sehingga pendapatan asli daerah ini sebagai alternatif untuk keperluan pengeluaran guna memperoleh tambahan dana. Pada pendapatan asli daerah ini yang menjadi modal dasar pemerintahan daerah.<sup>5</sup> Sehingga, dalam pendapatan asli daerah ini memiliki tingkatan yang rendah yang disebabkan kurangnya intensifnya terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk dapat mengetahui kemampuan suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari kriteria yang biasanya

---

<sup>4</sup> Muhammad Idris Patarai, *KINERJA KEUANGAN DAERAH* (A. Emil Mattotorang, n.d.), 44–45.

<sup>5</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Deepublish, 2018), 10–11.

pemerintah daerah lakukan, dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ini merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan yang seimbang.<sup>6</sup> Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adanya perkembangan ekonomi terdapat faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini termasuk input potensial yang digunakan untuk meningkatkan faktor produksi.<sup>7</sup> Akan tetapi, dengan adanya jumlah penduduk sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang baik bagi pemerintahan daerah, dengan adanya jumlah penduduk yang padat dapat meningkatkan perkembangan ekonomi.

Pendapatan asli daerah termasuk sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang dapat ditingkatkan secara optimal dan juga termasuk modal dasar pemerintah daerah dalam memenuhi belanja daerah untuk mendapatkan dana pembangunan. Terhadap pembiayaan bangunan daerah itu bergantung pada pusat

---

<sup>6</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 18–19.

<sup>7</sup> Vikie A Asmuruf, Makdalena F Rumat and George M. V. Kawung, “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015): 732.

dengan ini indikasi nyata pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah ini yang menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah diperlukan dengan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah pada pemberian penetapan tarif pajak.<sup>8</sup> Pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk perlakuan obyek yang cukup menarik untuk diteliti karena berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah ini termasuk pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah guna untuk pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam PAD permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya realisasi pendapatan asli daerah dapat diketahui adanya suatu permasalahan dalam daerah tersebut. Akan tetapi, dalam pemungutan pajak daerah pastinya terdapat kendala dari suatu para pelaku tidak mau dikenakan pajak atau tidak mau membayarnya. Namun, dengan adanya PAD dapat membantu daerah untuk mensejahterakan masyarakat dengan perkembangan infrastruktur disekitarnya.<sup>9</sup> Pengelolaan keuangan daerah juga harus dioptimalkan dengan baik dalam penggunaannya. Pada Kabupaten Banyuwangi yang sistem pengelolaannya baik, akan tetapi dalam pemungutan pajak daerah

---

<sup>8</sup> sabri çimen, Faiz Albar Nasution, and Mokhammad Samsul Arif, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 12, no. 2 (2020): 6.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021), 20–21.

kurang dikarenakan banyak orang yang tidak membayar banyak atau menunggak pembayaran pajak sehingga akan dikenakan denda.

**Tabel 1.1.**  
**Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Sekar Kijang**

| Kabupaten       | Anggaran           | Realisasi          | Persen (%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| Kab. Jember     | 845.987.143.485,00 | 764.496.302.893,85 | 90,37%     |
| Kab. Banyuwangi | 576.546.564.200,00 | 567.756.888.962,16 | 98,48 %    |
| Kab. Lumajang   | 325.257.004.731,00 | 343.188.815.384,80 | 105,51%    |
| Kab. Situbondo  | 252.473.971.466,00 | 266.047.712.290,94 | 105,38%    |
| Kab. Bondowoso  | 250.803.864.324,00 | 211.009.393.993,12 | 84,13%     |

*Sumber: LKPD Wilayah Sekar Kijang*

Berdasarkan Penyajian diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi menduduki urutan nomer tiga dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwilayah sekar kijang, dengan realisasi anggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 sebesar Rp 567.756.888.962,16 atau 98,48%.<sup>10</sup> Akan tetapi, Kabupaten Banyuwangi ini dalam hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) ini cukup baik dan signifikan. Sehingga dengan adanya itu Kabupaten Banyuwangi dengan realisasi anggaran yang standart yang dapat mempengaruhi perolehan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk infrastruktur daerah.

**Tabel 1.2.**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023**

| Tahun | Keterangan         |                    |                |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|
|       | Anggaran           | Realisasi          | Persentase (%) |
| 2019  | 517.576.991.597,46 | 495.691.172.682,08 | 95,77%         |
| 2020  | 565.194.392.512,52 | 482.740.174.377,22 | 85,41 %        |
| 2021  | 505.891.075.188,26 | 520.021.954.381,20 | 102,79 %       |
| 2022  | 526.716.960.940,00 | 516.757.143.543,55 | 98,11 %        |
| 2023  | 576.546.564.200,00 | 567.756.888.962,16 | 98,48 %        |

*Sumber: Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2023*

<sup>10</sup> BPKAD Kab Jember, "LKPD-2023 KABUPATEN JEMBER.Pdf," n.d.

Berdasarkan penyajian data diatas pendapatan asli daerah ini antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini yang terdapat mengalami kenaikan maupun penerunuan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatannya. Dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) saat pandemi dan sesudah pandemi. Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 520.021.954.381,20 atau 102,79% sehingga dapat diketahui pendapatan asli daerah (PAD) 2021 teruntuk perolehan pendapatannya diatas pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 505.891.075.188,26 sedangkan setelah masa *covid-19* mengalami kenaikan yang cukup pesat, dikarenakan banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga dengan begitu banyaknya pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>11</sup> Selama 5 tahun terakhir ini untuk perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi selalu optimal dalam memperolehnya, karena pada persentase yang didapat dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diatas 80% dinyatakan cukup baik.<sup>12</sup>

**Tabel 1.3.**  
**Perbandingan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk**

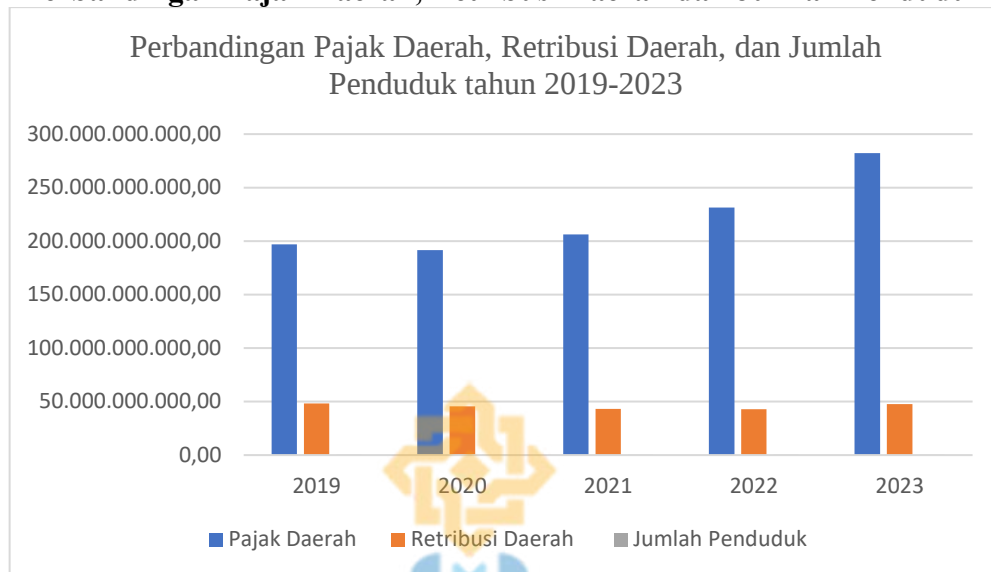
| Tahun | Keterangan         |                   |                 |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
|       | Pajak Daerah       | Retribusi Daerah  | Jumlah Penduduk |
| 2019  | 196.835.027.082,59 | 48.292.208.982,40 | 1.745.675.000   |
| 2020  | 191.631.105.711,59 | 45.631.411.394,00 | 1.749.581.000   |
| 2021  | 206.146.187.700,00 | 43.211.935.541,00 | 1.718.462.000   |
| 2022  | 231.458.652.487,00 | 42.989.558.015,92 | 1.731.731.000   |
| 2023  | 282.348.613.611,00 | 47.594.308.518,17 | 1.780.000.000   |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, 2022, dan 2023

<sup>11</sup> BPKAD Kab Banyuwangi, "LKPD 2021 Setelah Audited," 2021.

<sup>12</sup> BPKAD Kab Banyuwangi, "LKPD 2023 Setelah Audited" 2023.

**Gambar 1.1.**  
**Perbandingan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk**



*Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah tahun 2021-2023*

Berdasarkan penyajian data diatas bahwa diketahui dari jumlah keseluruhan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan.<sup>13</sup> Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) ini yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah yang didapat dari keberlangsungan kegiatan penduduk Kabupaten Banyuwangi. Berkembangnya Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan destinasi wisata yang banyak ini mendorong pendapatan daerah, dengan itu untuk keberlangsungan pengelolaan infrastruktur daerah. Namun, pajak daerah ini yang sering mengalami peningkatan terhadap pajak penerangan jalan dan pajak restoran karena pada penerangan jalan ini untuk keberlangsungan kegiatan penduduk pada malam hari. Dan pajak restoran ini karena banyak wisatawan asing dan banyak wisatawan yang baru sehingga dapat meningkatkan restoran untuk kegiatan penduduk. Sedangkan

<sup>13</sup> “BPS Kabupaten Banyuwangi,” accessed June 11, 2024, <https://banyuwangikab.bps.go.id/>.

retribusi daerah ini yang didapatkan dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha yang terdapat dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan dikontrakkan. Jumlah penduduk yang dimaksudkan adalah aktivitas penduduk yang dapat berkaitan dengan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Banyuwangi ini mendapat penghargaan atas hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta dapat dipengaruhi dari keberlangsungan aktivitas penduduk setempat. Namun, pendapatan asli daerah (PAD) yang baik setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup wajar, dengan hal itu semakin meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah serta aktivitas penduduk juga meningkat, maka dapat mempengaruhi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jadi, pada penelitian ini jumlah penduduk yang dimaksudkan adalah aktivitas penduduk karena dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih dominan itu dalam pelaksanaan aktivitas penduduk yang dapat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Berdasarkan penelitian diatas untuk mengetahui lebih lanjut dalam hal persepsi perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Demikian, untuk dapat melakukan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah,**

---

<sup>14</sup> “BPS Kabupaten Banyuwangi.”

## **Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat serta dapat menambah keilmuan terkait pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan menjadi persyaratan menyelesaikan tugas akhir, sekaligus sebagai pengalaman dan pemahaman terhadap pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

###### **b. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa khusus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman dan pengetahuan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk pada Kabupaten Banyuwangi.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan karakteristik, sifat, dan variasi nilai suatu variabel yang dimiliki obyek penelitian dapat menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini variabel yang diambil dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

#### a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang dalam waktu berada bersamaan dengan variabel lain maka akan berubah keragamannya.

Variabel bebas ini disebut dengan istilah variabel *stimulasi*, *predictor*, dan *antecedent*.<sup>16</sup> Terdapat variabel independen dalam penelitian ini

adalah Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ).

#### b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat ini berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaanya adanya suatu akibat dari variabel

<sup>15</sup> Maria Veronika Roesminingsih et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2024), 10–12.

<sup>16</sup> Bambang Perastyo dan Lina miftahul Jannah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Rajagrafindo Persada, vol. 3, 2016.

bebas. Variabel terikat ini disebut dengan istilah variabel *outcome*, *criterion*, *effect*, dan *response*.<sup>17</sup> Terdapat variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

## 2. Indikator Variabel

Indikator variabel ini yang dapat digunakan untuk kelanjutan dari variabel-variabel yang telah diteliti yang dapat berakitan dengan itu variabel-variabel yang akan diuji.

### a. Pajak Daerah ( $X_1$ )

Terdapat beberapa indikator variabel, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Inflasi.
2. Jumlah penduduk.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### b. Retribusi Daerah ( $X_2$ )

Terdapat beberapa indikator variabel, sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah.
2. Jumlah penerimaan retribusi daerah.
3. Jumlah wajib pajak.

### c. Jumlah Penduduk ( $X_3$ )

Terdapat beberapa indikator variabel, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk.

<sup>17</sup> Ika Rahayu Satyaninrum et al., *Metodologi Penelitian* (Cendekia Publisher, 2022), 77–78.

<sup>18</sup> Hardy Wiguna Nababan, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan,” *Skripsi, Universitas Medan Area*, 2020, 8–20.

2. Proporsi penduduk perkotaan dan pedesaan.
  3. Angka ketergantungan antara usia non-produktif dengan usia produktif.
- d. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Terdapat beberapa indikator variabel, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Persentase realisasi penerimaan PAD terhadap target.
2. Tingkat pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Tingkat pajak daerah dan retribusi daerah.

## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan dari judul yang diangkat oleh peneliti yang digunakan sebagai pijakan pengukuran terhadap variabel penelitian yang didasarkan oleh indikator-indikator variabel yang dapat bersangkutan, pada penelitian yang termasuk ke dalam definisi operasional dapat dikemukakan, sebagai berikut:<sup>20</sup>

### a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pada pajak daerah dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang digunakan untuk sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Hidyanti Endang Astuti, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2017-2021)," *JAF-Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (2023): 87.

<sup>20</sup> Benny Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN, 2022.

<sup>21</sup> Nurhayati, *Pajak Daerah* (CV. Dalni Bintang, n.d.), 01.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah atau sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.<sup>22</sup>

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Secara umum jumlah penduduk termasuk total semua orang yang berdomisili diwilayah geografis suatu negara dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> Jumlah penduduk yang begitu besar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk menuju keberhasilan pembangunan dan dalam mengatasi masalah penduduk antara lain meliputi komposisi, jumlah dan distribusi penduduk maka harus ada pengendalian jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu aktivitas penduduk.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>22</sup> Anggoro, 18–19.

<sup>23</sup>Nanda Fitri Yenny and Khairil Anwar, “Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 19, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>.

undangan yang berlaku.<sup>24</sup> Pendapatan asli daerah termasuk akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

### G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian disebut juga anggapan dasar yang termasuk suatu gambaran atau perkiraan atau kesimpulan dari suatu teori sementara yang belum adanya pembuktiaan.<sup>25</sup> Peneliti dapat meyakini kebenarannya berfungsi sebagai tempat untuk berpijak untuk melakukan penelitian. Adapun beberapa asumsi penelitian ini adalah:

- a. Pandangan pada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Pajak daerah dalam kegiatannya dapat dijadikan penerimaan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Retribusi daerah dalam kegiatan pemungutannya yang sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Pengaruh jumlah penduduk dalam melakukan kegiatannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Terdapat pengaruh antara pemerintahan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD).

---

<sup>24</sup> Achmad Sani Alhusain et al., *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 20.

<sup>25</sup> Wendi Rais et al., "Asumsi Dalam Ilmu," *JEM: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang* 6, no. 1 (2020): 74–82.

## H. Kerangka Berfikir

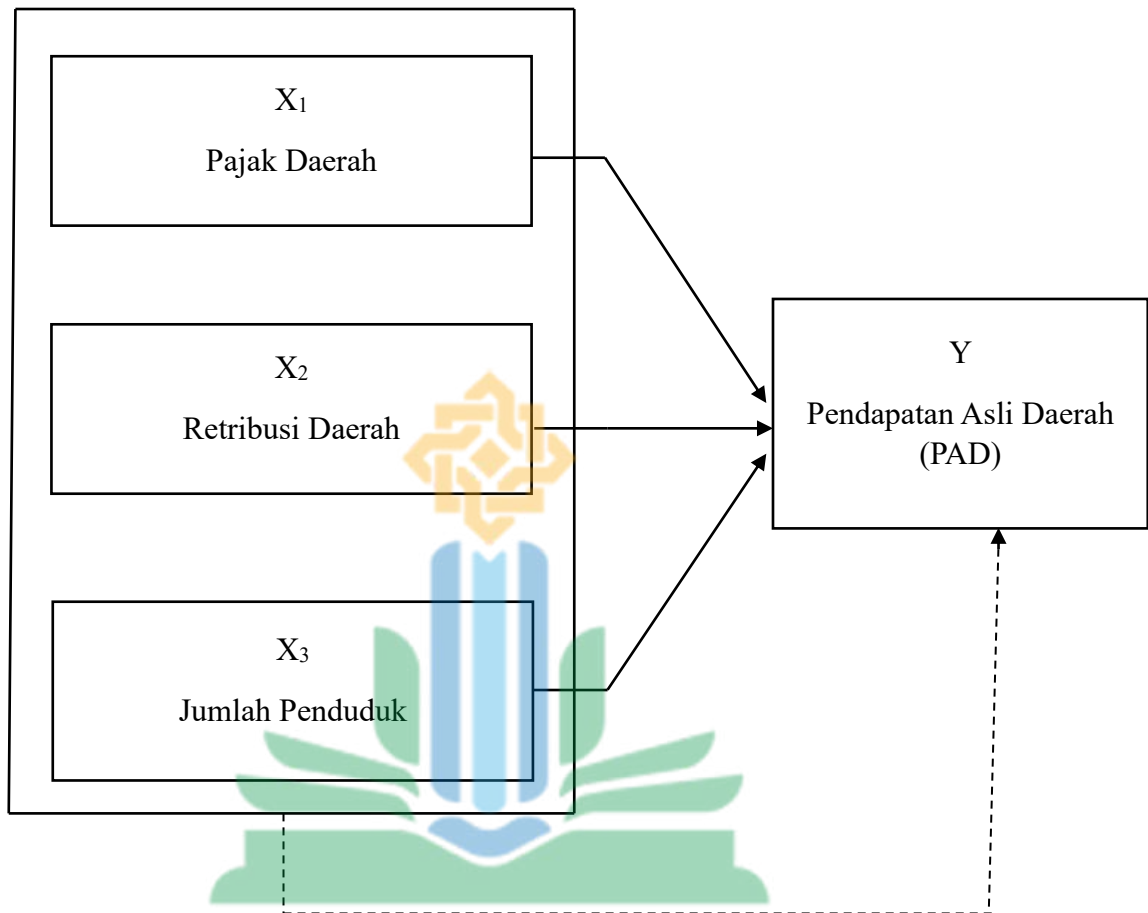
Pada kerangka berfikir ini merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang dapat menyatukan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bentuk bagan yang dapat menunjukkan alur pikir peneliti yang berkaitan antara variabel yang diteliti.<sup>26</sup> Kerangka berpikir dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan dalam kajian teori yang telah dibahas selanjutnya akan diuraikan pada kerangka berpikir yang mengenai pada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

**Gambar 1.2.**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Indikator Variabel<sup>27</sup>

Keterangan:

- = Pengaruh Parsial
- - - - -→ = Pengaruh Simultan

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022, 50.

## I. Hipotesis

Setelah asumsi penelitian sudah ditentukan, maka untuk hipotesis yang dapat dijadikan sebagai pernyataan sementara terhadap penelitian ini yang menjadikan jawaban sementara sampai dengan terbuktinya melalui data yang terkumpul. Hipotesis ini yang menghubungkan dua variabel atau lebih dalam hubungan sebab akibat yang dapat digunakan untuk mendalami masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya.<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Berdasarkan pengertian diatas, hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah.<sup>29</sup>

1. Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh pajak daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh pajak daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>28</sup> Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Zifatama Jawara, N.D.), 24–26.

<sup>29</sup> Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, “Hipotesis Penelitian Kuantitatif,” *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 96–102, <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>.

H<sub>b</sub>: Terdapat pengaruh retribusi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>1</sub>: Tidak terdapat pengaruh retribusi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

3. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>c</sub>: Terdapat pengaruh jumlah penduduk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>2</sub>: Tidak terdapat pengaruh jumlah penduduk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

4. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>d</sub>: Pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

H<sub>4</sub>: Pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara simultan tidak berpengaruh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini supaya mendapatkan tujuan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang

sudah ditentukan. Pada penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini yang berisi penjabaran dari penelitian skripsi yang terbagi atas beberapa bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, hingga sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan, pada bab ini yang berisi penjabaran dari penelitian skripsi yang memuat penelitian terdahulu hingga dengan kajian teori, sebagaimana untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini yang berisi penjabaran penelitian ini yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrument pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini yang didalamnya menjabarkan terkait gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, hingga pembahasan.

BAB V : Penutup, pada bab ini yang berisi penjabaran yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya agar dapat dipahami seksama serta memberikan saran yang menjadi pengamalan dalam pengambilan keputusan kepada pihak terkait dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah telah banyak dikaji oleh para peneliti dari berbagai lintas disiplin ilmu.<sup>30</sup> Namun, perlunya melakukan perkembangan penelitian memiliki corak pembeda dalam pembahasan yang dibahas. Pada penelitian ini memandang perlunya menguraikan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk memastikan orisinalitas karya yang dibuat, termasuk juga dengan posisi penelitian yang digunakan.

- a. Jurnal yang ditulis oleh I Putu Agus Sudarmana, Gede Mertha Sudiarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali, tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah”.<sup>31</sup>

Dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Bayar

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

<sup>31</sup> I Putu Agus Sudarmana and Gede Mertha Sudiarta, “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (2020): 1338, <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.

kewajiban pajak maupun retribusi daerahnya. Karena hasil dari komponen pendapatan asli daerah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Kesimpulan dari penelitian ini, Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini pastinya mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan regresi linier berganda dan berfokus pada pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Agusta, Akuntansi, STIE-LPI, Makasar, tahun 2020 dengan judul “Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba”.<sup>32</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan dari penelitian ini, Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara nilai rupiah mengalami kenaikan. Berdasarkan total dari Penerimaan Pajak

---

<sup>32</sup> Revoldai Agusta, “Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba,” *Journal of Applied Managerial Accounting* 4, no. 1 (2020): 33–41, <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>.

Daerah dan Retribusi Daerah dari Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 beserta dengan kontribusinya masing-masing terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kita dapat mengetahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Penrerimaan Retribusi Daerah karena dengan peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan ini meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keputusan Daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan menggunakan metode kualitatif.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu, tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”.<sup>33</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan studi kasus empiris di Kabupaten XYZ periode tahun 2009 – 2018. Menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan

---

<sup>33</sup> LiaJuhriah Lukitawati, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,” *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)* 1, no. 2 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>.

Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini, Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang artinya bahwa semakin tinggi pajak daerah yang diterima maka semakin meningkat pula kemandirian keuangan daerah yang dimiliki. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang artinya bahwa semakin tinggi retribusi daerah yang diterima maka semakin meningkat pula kemandirian keuangan daerah yang dimiliki. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Ariska Oktiani, Novie Al Muhariah, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Baturaja, tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan”.<sup>34</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (RGR) Provinsi Sumatera Selatan. bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap. Kesimpulan dari penelitian ini, secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli

---

<sup>34</sup> Ariska Oktiani, “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 16–35.

daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Secara simultan variabel jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Persentase sumbangan pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pada penelitiannya ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data regresi linier berganda dan pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan pembahasan penelitian ini pada inflasi.

- e. Jurnal yang ditulis oleh Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin, tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota”.<sup>35</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan ada beberapa wajib pajak yang melakukan penunggakan terhadap pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kesimpulan

---

<sup>35</sup> Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,” *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3269>.

dari penelitian ini, secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai yang berarti kecil dari nilai signifikansi hal ini juga. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan pembahasan pada pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan regresi ordinal.

- f. Jurnal yang ditulis oleh Rizka Famela Meinanda, Anissa Yuniar Larassati, tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019)”.<sup>36</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk menguji pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pemerintah daerah asli pendapatan dengan fokus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi di bidangnya periode 2015-2019. secara parsial pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap asli Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Asli Daerah pendapatan pemerintah, sedangkan secara simultan pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah. Kesimpulan dari penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 mengalami

---

<sup>36</sup> Rizka Famela Meinanda and Annisa Yuniar Larasati, “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019),” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* 15, no. 2 (2021): 7–8.

fluktuatif. Realisasi PAD Kota Cimahi termasuk kedalam kriteria yang baik, karena penerimaan PAD kota Cimahi selalu mencapai target atau lebih dari 100% setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 dan secara parsial kontribusi retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019. Sedangkan secara simultan kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan fokus pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan menggunakan jenis penelitian deskriptif asosiatif.

- g. Jurnal yang ditulis oleh Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu”.<sup>37</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis “pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota Di Provinsi Bengkulu” secara parsial serta menganalisis menganalisis

---

<sup>37</sup> Tiara Kencana, Aladin Aladin, and Rosy Armaini, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 08 (2022): 1144–49, <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>.

pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultam. Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. dan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan nilai signifikasi  $< 0.05$  yaitu 0.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pajak daerah Provinsi Bengkulu memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan hasil analisis koefisien determinasi. Pada penelitian ini pastinya mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan fokus pembahasan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.

- h. Jurnal yang ditulis oleh Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto, tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”.<sup>38</sup>

Dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

---

<sup>38</sup> Denna Aprilla Ardiyanti et al., “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat,” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2022): 76–100, <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>.

dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Menunjukkan bahwa pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan dari penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2021. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan fokus pembahsan pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu obyek penelitian dan pada penelitian ini juga membahas Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-lain.

- i. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sabyan, Iqra Wiarta, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi, tahun 2024 dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi”.<sup>39</sup>

Dari hasil penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh

---

<sup>39</sup> Muhammad Sabyan and Iqra Wiarta, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi,” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 01 (2024): 179–85.

negatif yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang juga tidak signifikan. Namun, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, mengindikasikan peranan penting pendapatan asli daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini, Pajak daerah menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan retribusi daerah memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini menandakan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data regresi linier berganda dan fokus permasalahan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian ini mempunyai perbedaannya yaitu obyek penelitian, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dan penelitian ini pembahasan pada penyerapan tenaga kerja.

- j. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, Natassia Widjaja, Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa, Kota Medan, tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, Natassia Widjaja, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2022,” *Jurnal Ilmu ekonomi*, no. 2 (2024): 7043–53.

Dari hasil penelitian ini Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maka dilakukan pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab negara didanai dari APBN. Kegagalan realisasi PAD pada pemerintah daerah Sumatera Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kesimpulan pada penelitian ini, pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif dan penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan obyek penelitian dan jenis penelitian yang digunakan adalah asosiasif.

**Tabel 2.1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan**

| No. | Nama, Judul, dan Tahun                                                                                                                                                                                | Persamaan                                                                                                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | I Putu Agus Sudarmana, Gede Mertha Sudiarta, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah", tahun 2020.                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan regresi linier berganda.</li> <li>2. Berfokus pada pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Variabel penelitian.</li> </ol>                                                                                               |
| 2.  | Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, Revoldai Agusta, "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba", tahun 2020. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ol>                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Menggunakan metode kualitatif.</li> </ol>                                                                                     |
| 3.  | Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", tahun 2020.                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode kuantitatif.</li> <li>2. Pembahasan ini pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ol>                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif.</li> <li>3. Pembahasan ini terfokus terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> </ol> |
| 4.  | Ariska Oktiani, Novie Al Muhariah, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teknik pengumpulan data regresi linier berganda.</li> <li>2. Pengaruh jumlah penduduk terhadap</li> </ol>                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Pembahasan penelitian ini pada inflasi.</li> </ol>                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Provinsi Sumatera Selatan”, tahun 2021.                                                                                                                                                                                      | pendapatan asli daerah.                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 5. | Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota”, tahun 2021.                                                       | 1. Menggunakan metode kuantitatif.<br>2. Pembahasan pada pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.       | 1. Obyek penelitian.<br>2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dan regresi ordinal.                                                         |
| 6. | Rizka Famela Meinanda, Anissa Yuniar Larassati, “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019)”, tahun 2021. | 1. Menggunakan metode kuantitatif.<br>2. Fokus pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. | 1. Obyek penelitian.<br>2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif asosiatif.                                                                   |
| 7. | Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu”, tahun 2022.                                                                          | 1. Menggunakan metode kuantitatif.<br>2. Fokus pembahasan pada pajak daerah dan retribusi daerah.                                 | 1. Obyek penelitian.<br>2. Menggunakan jenis penelitian deskriptif.                                                                             |
| 8. | Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum,                                                                           | 1. Menggunakan metode kuantitatif.<br>2. Fokus pembahsan pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah.                         | 1. Obyek penelitian.<br>2. Pada penelitian ini juga membahas Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-lain |

|     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”, tahun 2022.                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | Muhammad Sabyan, Iqra Wiarta, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi”, tahun 2024.                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teknik pengumpulan data regresi linier berganda.</li> <li>2. Fokus permasalahan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada daerah tersebut.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.</li> <li>3. Penelitian ini pembahasan pada penyerapan tenaga kerja.</li> </ol> |
| 10. | Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, Natassia Widjaja, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022”, tahun 2024. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode kuantitatif.</li> <li>3. Penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek penelitian.</li> <li>2. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiasif.</li> </ol>                                                                  |

Sumber: Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini yang dapat diperoleh dari

pemerintah daerah atas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah yang sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam meningkatkan PAD, kebijakan PAD daerah, pada kemampuan daerah yang dapat memenuhi pembiayaan baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya serta dengan sumber PAD lain yang sah yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan.<sup>42</sup>

## 2. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada hasil pendapatan asli daerah (PAD) ini yang digunakan untuk pertumbuhan daerah guna mensejahterakan masyarakat. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:<sup>43</sup>

### a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah ini yang sebagai pungutan daerah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang mana dengan ini

<sup>41</sup> Kementerian Keuangan RI, "Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)* 20 (2017): 20.

<sup>42</sup> Achmad Sani Alhusain et al., *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 03–06.

<sup>43</sup> BPK, "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.," 2006, 1–73.

hasilnya diperuntukan pada pengeluaran umum yang secara tidak langsung digunakan dalam pelaksanaannya yang dengan itu bisa dapat dipaksakan. Hasil pajak daerah ini termasuk dalam pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah sebagai pembiayaan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pada retribusi daerah ini yang mempunyai sifat-sifat adalah dalam pelaksanaannya bersifat ekonomis, retribusi daerah ini yang ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada juga alternatif untuk mau tidak membayar yang merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Hasil retribusi daerah adalah pungutan yang telah ditetapkan secara hukum sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang diterima dari pekerjaan, bisnis, atau juga aset pemerintah daerah yang bersangkutan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah berasal dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian dari anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah.

Perusahaan milik daerah didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan jasa, menjaga kesejahteraan umum, dan menumbuhkan keluarga.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pada hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, atau pendapatan dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan usaha yang menghasilkan hasil, baik dalam bentuk materi dalam acara tersebut, yang bertujuan untuk mendukung, memperkuat, atau memantapkan kebijakan daerah di bidang tertentu.

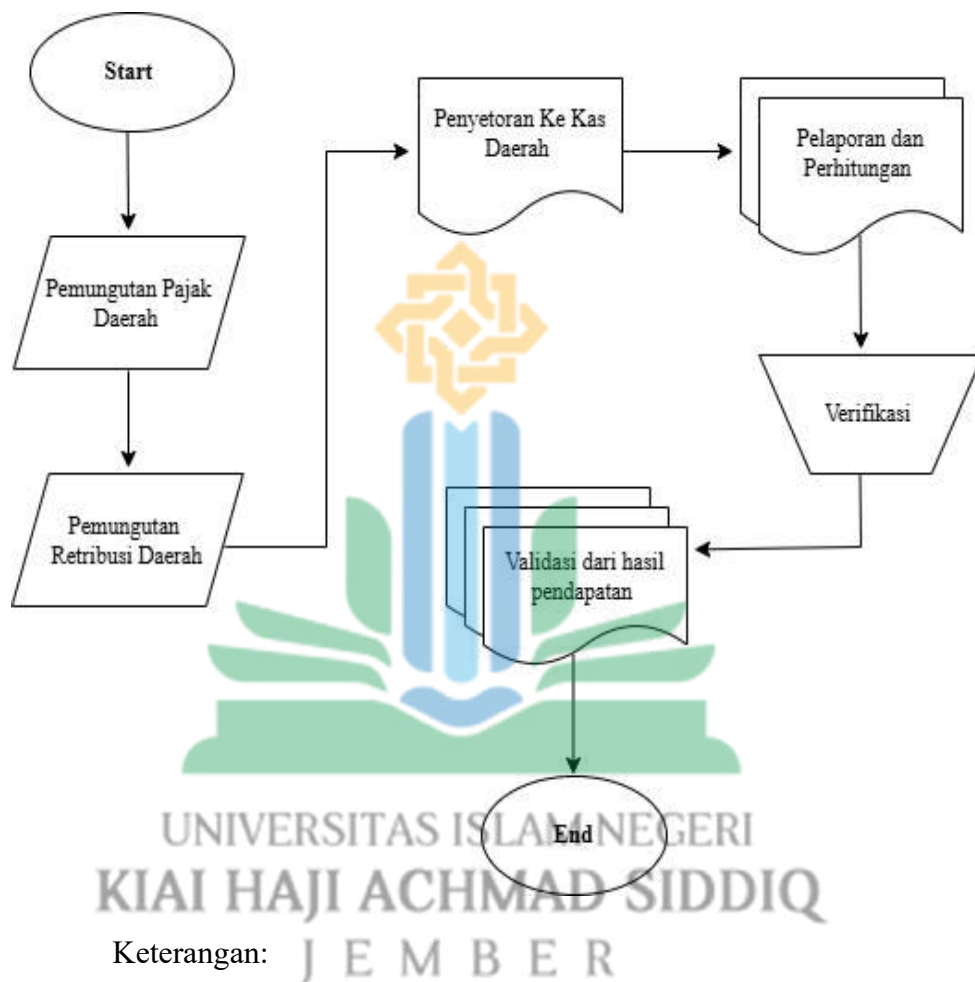
Dari penjelasan diatas Pendanaan daerah yang diterima oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai pendapatan asli daerah.<sup>44</sup> Selama pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi, pihak ketiga, atau pinjaman daerah, Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar dominan dan mampu menanggung beban kerja yang diperlukan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

<sup>45</sup> Nur Ika Mauliyah et al., "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember," *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1 (2023), <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/109>.

Gambar 2.1.

**Alur Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- Start, untuk memulai kegiatan.
- Pemungutan pajak daerah, kegiatan ini dilakukan untuk memungut pajak daerah kepada wajib pajak.
- Pemungutan retribusi daerah, kegiatan ini dilakukan untuk memungut retribusi daerah atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

- d. Penyetoran ke Kas Daerah, dokumen ini dilakukan setelah itu pemungutan pajak yang akan disetorkan ke Kas Daerah untuk melakukan pencatatan kepada Pemerintah Daerah.
- e. Pelaporan dan perhitungan, dalam hal ini setelah pencatatan penyetoran ke Kas Daerah setelah itu akan dilakukan pelaporan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang.
- f. Verifikasi, untuk mengetahui apakah penyetoran kas daerah udah masuk atau belum.
- g. Validasi, pengujian kebenaran dari hasil verifikasi sebelumnya untuk menyesuaikan data yang telah dimasukkan.
- h. End, rangkain semua kegiatan dalam alur PAD telah selesai.

### 3. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan. Pendapatan daerah yang sah terdiri dari sumbangan pemerintah, sumbangan lain yang diatur oleh undang-undang, dan sumbangan dari pemerintah.

### 4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) merupakan semua penerimaan yang dapat menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang dapat menjadi hak Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LRA diklasifikasikan sesuai

dengan struktur terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan tetapi belum dianggarkan, tetap dilaporkan dalam Pendapatan LRA sesuai dengan kode rekening pendapatannya. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah atau rekening BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) tetap dicatat sebagai Pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA diukur dengan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah atau rekening BLUD tetap dicatat sebagai Pendapatan-LRA.

##### 5. *Basic Akuntansi Pendapatan*

Basis akuntansi pendapatan daerah merupakan prinsip-prinsip dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi pajak daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat mempengaruhi penyajian informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual yang dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, "KONSIDERAN PERBUP - 2023.Pdf," n.d.

## b. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian guna penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang harus didasarkan pada Undang-Undang. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.<sup>47</sup> Ada kemungkinan pajak daerah akan terus ditambah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan pajak lokal merupakan komponen yang signifikan dari pendapatan daerah.<sup>48</sup>

Berdasarkan lembaga pemungutannya, maka pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. sementara pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Contohnya termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

<sup>47</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 37–39.

<sup>48</sup> Audy Yosi Meyla, Desy Puspita Arum, and Devi Hardianti Rukmana, “Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 203–8, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.336>.

Bangunan (BPHTB).<sup>49</sup> Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah.<sup>50</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pajak ini sangat penting bagi suatu negara, karena dapat digunakan untuk mengatur ekonomi dan mempromosikan kesetaraan pendapatan. Fungsi utama pajak adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak fungsi *budgetair*, yang dapat berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah meningkatkan dan dapat meningkatkan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

### b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak fungsi *regulerend*, yang berarti mereka berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam

<sup>49</sup> Hilda Aderia Husaini Nur Ika Mauliyah, Okta Ayu Lestari and Muhammad Raziv Aulia Effendi, "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)* 2, no. 1 (2023).

<sup>50</sup> Hamidah et al., *Perpajakan* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 23–25.

<sup>51</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Sinar Grafika, 2022), 22–23.

bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dalam fungsi pajak diatas, bahwa pajak memiliki banyak manfaat penting bagi suatu pemerintahan diantaranya pajak yang sebagai sumber pendanaan suatu negara, sebagai alat pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi dalam negeri.

### 3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak kabupaten atau kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak Kabupaten atau Kota, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. PBB Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

---

<sup>52</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah* (Jakad Media Publishing, n.d.), 237–38.

### c. Retribusi Daerah

#### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Selain pajak, pemerintah dapat melakukan pemungutan lain yaitu retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>53</sup> Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Perbedaan yang nyata dari pajak dan retribusi adalah bahwa dalam pajak tidak dikenal prestasi langsung dari negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak sedangkan dalam retribusi, negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi dari negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Dalam implementasinya tidak semua jasa dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

#### 2. Obyek Retribusi Daerah

Dalam pemungutan retribusi daerah ini terdapat obyek retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:<sup>54</sup>

##### a. Retribusi Jasa Umum

<sup>53</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 237–38.

<sup>54</sup> "Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27–28.

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

#### 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>55</sup>

##### b. Retribusi Jasa Usaha

Pada dasarnya, jasa usaha dapat disediakan oleh sektor swasta, akan tetapi, pemerintah daerah juga melakukannya dengan prinsip komersial. Pada objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air.

---

<sup>55</sup> Anggoro, 237–238.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.<sup>56</sup>

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengawasi, dan mengawasi kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Tujuan dari perizinan tertentu adalah agar pemegang izin melakukan hal-hal tersebut. Jenis biaya yang terkait dengan izin tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.<sup>57</sup>

d. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan jumlah keseluruhan orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia (RI) selama enam bulan atau lebih serta berdomisili kurang dari enam bulan tetapi memiliki tujuan menetap. Jumlah penduduk ini termasuk indikator

---

<sup>56</sup> Anggoro, 237.

<sup>57</sup> Anggoro, 238.

penting dalam suatu negara. Untuk menuju keberhasilan pembangunan dan dalam mengatasi masalah penduduk antara lain meliputi komposisi, jumlah dan distribusi penduduk maka harus ada pengendalian jumlah penduduk.<sup>58</sup>

Pada penelitian ini jumlah penduduk yang dimaksudkan adalah aktivitas penduduk untuk perolehan pendapatan suatu daerah yang berupa penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya penduduk dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah dan berpengaruh terhadap PAD di daerah tersebut.<sup>59</sup>




---

<sup>58</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi* (UGM PRESS, 2018), 22.

<sup>59</sup> Siti Romlah et al., "Implementasi Aplikasi Jember-Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) Dalam Menunjang Keberhasilan Layanan Kependudukan," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 3 (2024): 158–63, <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.233>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian ini membutuhkan suatu metode untuk dapat menemukan dari jawaban dan kejelasan dari sebuah pengetahuan. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam memecahkan masalah dari persoalan yang diteliti.<sup>60</sup> Penelitian ini akan dapat dilakukan dengan hati-hati dengan berpedoman pada metode yang sudah dicantumkan, sehingga nantinya diperoleh pemecahan suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pada sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian yang dipilih yaitu pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang berdasarkan pengukuran variabel yang diteliti ini yang dapat menghasilkan data. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai perkembangan pada saat ini yang bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis jawaban suatu masalah yang telah diangkat. Pada tujuan penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teoritis, dan teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang diteliti.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sigit Hermawan, and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 15–19.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 30.

Sedangkan jenis penelitian ini yang digunakan yang dipilih yaitu jenis penelitian Deskriptif. Pada jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara keseluruhan. Fokus penelitian ini dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Banyuwangi yang dapat dikaitkan dengan menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik dari pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Nantinya akan dilakukan pengumpulan data untuk memperkuat suatu jawaban pada masalah yang diangkat berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi ini merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>62</sup> Pada penelitian ini populasi adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2019-2023 dan data hasil sensus jumlah penduduk tahun 2019-2023 dari Badan Pusat Statistik.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang dapat menentukan sampel yang jumlahnya

---

<sup>62</sup> Sugiyono, 81.

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data.<sup>63</sup> Pada penelitian ini pengambilan sampel yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2019-2023 dan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2019-2023.

### C. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang amat penting dalam suatu penelitian, karena data-data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam pengumpulan data ini dapat menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut:

#### a. Sumber Data

Data adalah suatu bahan mentah yang ketika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi.<sup>64</sup> Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dapat diperoleh peneliti dari situs dan dokumen pemerintah daerah.

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh ketika pengumpulan data untuk penelitian ini pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2023 dan data hasil sensus pada Badan Pusat Statistik tahun 2019-2023. Data-data ini yang diperoleh dari pengumpulan data menggunakan situs atau website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik dan memperhatikan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>63</sup> Sugiyono, 81.

<sup>64</sup> Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika (Edisi Ketiga): Cara Mudah Memahami Statistika* (Bumi Aksara, 2020), 15.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan data dengan penelitian pendahuluan dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai bantuan seperti, dokumen dan buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah yang dapat berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Pada studi kepustakaan ini untuk teknik pengumpulannya dapat dilakukan melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti, buku, penelitian terdahulu, artikel, dan laporan.

Pada teknik pengumpulan data yang berupa data sekunder dengan mengakses dan mengunduh data sekunder untuk penelitian ini yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2019-2023 serta pengumpulan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan hasil sensus pada Badan Pusat Statistik tahun 2019-2023.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah

penelitian ini. Dengan melakukan penelusuran untuk penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan keuangan pada akhir periode, dan data yang relevan dengan penelitian.<sup>65</sup> Dokumen yang dimaksud adalah dokumen Laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun.

#### **D. Analisis Data**

Pada penelitian kuantitatif, analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah pengolahan data telah selesai dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Analisis data ini merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis berdasarkan variabel serta responden yang dapat menyajikan data tiap variabel yang akan diteliti, untuk melakukan perhitungan serta menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah disajikan. Kemudian setelah data semua terkumpul, dapat dilakukan analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan:

##### **a. Uji Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui data pada variabel seperti, mean, nilai minimum, nilai maximum dan standart deviasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data selain penyajian tabel dan grafik. Selain itu, statistik deskriptif memberikan gambaran sum, range, kutosis (derajat keruncingan), dan skewness (kemencengan distribusi).

##### **b. Uji Asumsi Klasik**

###### **1. Uji Normalitas**

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 137.

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak normal.<sup>66</sup> Cara untuk melihat normalitas residu dengan melihat grafik histogram, yang dapat diketahui normal apabila hasil histogram dapat memperlihatkan pola tidak miring ke kiri dan ke kanan serta seluruh batang variabel berada dalam histogram.

Pada pengujian kenormalan data dilakukan melalui *Kolmogorov-Smirnov* untuk semua variabel dengan menggunakan SPSS. Adapun Pengujian ini dapat dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi residual data adalah normal.
- b. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi residual data adalah tidak normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi atau tidak terhadap data tersebut dalam regresi. Pada uji multikolinearitas hanya bisa dilakukan apabila variabel independennya lebih dari satu. Uji ini dapat dideteksi menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Terdapat dasar untuk pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dengan nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagai berikut:<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Aminatus Zahriyah et al., *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*, Mandala Press, 2021, 75.

<sup>67</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, Cv. Wade Group, 2017, 116–124.

- a. Apabila nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinieritas.
  - b. Apabila nilai tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain.<sup>68</sup> Cara untuk melihat ketidaksamaan antar residual dari hasil ujia *Scatterplots*. Terdapat dasar untuk pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- a. Apabila ada pola tertentu, seperti panah (poin-poin) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) telah terjadi heteroskestisitas.
  - b. Apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskestisitas.
4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk model regresi dapat dikatakan baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Statistic Run Test*. Pada uji Run Test hanya digunakan untuk menguji apakah

---

<sup>68</sup>Zahriyah et al., *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*, 89–100.

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dalam hipotesis yang akan diuji yaitu:

1.  $H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ )
2.  $H_a$  : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Dengan uji hipotesis diatas, untuk dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan uji *Run Test*, sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat autokorelasi
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat autokorelasi

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel terikat (*variabel dependent*).<sup>69</sup> Pada analisis data regresi linier berganda ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data menggunakan alat SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). SPSS merupakan sebuah software yang digunakan untuk analisis data statistik. Analisis menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) untuk memudahkan proses pengolahan, analisis, dan interpretasi data, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang bermakna dari data yang telah dimiliki.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sofiyatul Madaniyah, Nurul Setianingrum, and Retna Anggitaningsih, "Pengaruh Service Quality Dan Kualitas Produk Tabungan Haji Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep," *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2024): 21–33, <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1732>.

<sup>70</sup> Aminatus Zahriyah et al., 62–69.

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk. Adapun rumus analisis regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Jumlah Penduduk

e = Error

d. Uji Hipotesis

Pada uji hipotesis dalam penelitian ada tiga tahap adalah uji parsial (uji t), uji simultan (uji-F) dan uji determinasi ( $R^2$ ), adalah sebagai berikut:

1. Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) dapat digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Terdapat kriteria yang telah ditentukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yang menggunakan t harga kritis t tabel dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan sebesar 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ).

Adapun kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Simultan (uji f)

Uji statistik F dapat menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel pajak daerah, retribusi daerah, serta jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0: \beta_i = 0$ , artinya variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta_i > 0$ , artinya variabel-variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk kriteria pengambilan keputusan, sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- b. Apabila probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variabel dependen.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Aspek Geografis

Pada aspek geografis Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dan terletak di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi ini termasuk wilayah yang terbagi atas dataran tinggi terdiri dari daerah pegunungan yang menghasilkan dengan berbagai jenis produksi perkebunan sedangkan dataran yang datar dengan potensi produksi tanaman pertanian, wilayah sekitar garis pantai yang membujur di Kabupaten Banyuwangi dari utara ke selatan yang menghasilkan berbagai biota laut.<sup>71</sup>

Kabupaten Banyuwangi dari lokasinya menjadikan Banyuwangi termasuk kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah lumbung padi. Menurut data statistik dapat menunjukkan bahwa adanya indikasi kuat yang memiliki potensi pertanian yang besar dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, berdasarkan keadaan geografisnya Kabupaten Banyuwangi termasuk wilayah yang subur untuk tanaman bahan makanan, termasuk juga yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi perkebunan dan kehutanan, serta

---

<sup>71</sup> “Geografi Daerah Banyuwangi,” accessed November 30, 2024, <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

memiliki peluang besar untuk mengembangkan inisiatif yang akan meningkatkan potensi kelautan.<sup>72</sup>

Berdasarkan garis batas koordinatnya, Kabupaten Banyuwangi perbatasan di wilayah utara dengan Kabupaten Situbondo, diwilayah sebelah timur dengan dengan selat bali, diwilayah sebelah selatan perbatasan dengan Samudra Hindia, serta di wilayah sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Posisi Kabupaten Banyuwangi 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara keseluruhan administrasi wilayah di Kupaten Banyuwangi dapat terbagi menjadi 24 wilayah kecamatan dengan luas wilayah sebesar 5.782,50 km<sup>2</sup>. Adapun perbatasan wilayah di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- b. Sebelah Timur : Selat Bali
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso

Secara umum Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah terletak di bawah equator yang dikelilingi oleh laut jawa, selat bali, dan samudra Indonesia. Untuk mengenai batas administratif Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Hamriani Ryka, Martheana Kencanawati, and Abdul Syahid, "Sistem Informasi Geografis (GIS) Dengan Arcgis Dalam Pemanfaatan Analisis Banjir Di Kelurahan Sepinggan," *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil TRANSUKMA* 3, no. 1 (2020): 42–51, <https://doi.org/10.36277/transukma.v3i1.70>.

<sup>73</sup> "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi," accessed December 1, 2024,

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi**

| No.           | Kecamatan   | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) |
|---------------|-------------|---------------------------------|
| 1.            | Pesanggaran | 802,5                           |
| 2.            | Siliragung  | 95,15                           |
| 3.            | Bangorejo   | 137,43                          |
| 4.            | Purwoharjo  | 200,30                          |
| 5.            | Tegaldlimo  | 1.341,12                        |
| 6.            | Muncar      | 146,07                          |
| 7.            | Cluring     | 97,44                           |
| 8.            | Gambiran    | 66,77                           |
| 9.            | Tegalsari   | 65,23                           |
| 10.           | Glenmore    | 421,98                          |
| 11.           | Kalibaru    | 406,76                          |
| 12.           | Genteng     | 82,34                           |
| 13.           | Srono       | 100,77                          |
| 14.           | Rogojampi   | 102,33                          |
| 15.           | Kabat       | 107,48                          |
| 16.           | Singojuruh  | 59,89                           |
| 17.           | Sempu       | 174,83                          |
| 18.           | Songgon     | 301,84                          |
| 19.           | Glagah      | 76,75                           |
| 20.           | Licin       | 169,25                          |
| 21.           | Banyuwangi  | 30,13                           |
| 22.           | Giri        | 21,31                           |
| 23.           | Kalipuro    | 310,03                          |
| 24.           | Wongsorejo  | 464,80                          |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>5.782,50</b>                 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Daerah barat dan utara adalah daerah pegunungan, sehingga daerah ini mempunyai tingkat kemiringan tanah rata-rata mencapai 40<sup>0</sup> dengan curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Serta Kabupaten Banyuwangi ini dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim:

- a. Musim penghujan, antara bulan Oktober sampai dengan April.

b. Musim Kemarau, antara bulan April sampai dengan Oktober.

Daerah datar yang terbuka luas bagian selatan hingga utara yang tidak ada bukit, dengan hal itu daerah ini banyak diairi sungai-sungai dapat berguna untuk mengairi hamparan sawah yang luas. Kontribusi daerah aliran sungai (DAS) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesuburan tanah. Pada Kabupaten Bayuwangi terdapat 35 daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengairi hamparan sawah yang luas dapat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah.

## 2. Topografi

Topografi wilayah dataran Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan serta bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah.<sup>74</sup> Pada tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, rata-rata curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian wilayah lainnya. Daerah dataran datar sebagian besar memiliki tingkat kemiringan kurang dari 150, rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah untuk ketersediaan pertanian.

Selain potensi terhadap bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, dengan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang termasuk sumber pertumbuhan baru dari perekonomian

---

<sup>74</sup> Rendi Rinanda, Wan Alamsyah, and Defry Basrin, "Analisis Topografi Dan Kerusakan Jalan Di Kecamatan Langsa Baro Dengan SIG," *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi* 6, no. 2 (2023): 147–57, <https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4510>.

rakyat.<sup>75</sup> Sedangkan pada benteng pantai yang cukup panjang dapat mengembangkan sumber daya kelautan yang dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan diservikasi pengelolaan kawasan pantai dan kawasan perairan laut.

### 3. Kependudukan

Penduduk merupakan subyek atau penyebab berkembangnya suatu pemukiman. Namun, penduduk juga termasuk dampak sosial dari suatu pertumbuhan dan perkembangan pada wilayah permukiman itu sendiri. Oleh karena itu, kependudukan ini termasuk suatu tatanan proses pembangunan yang menjadi penting bagi suatu daerah itu sendiri. Sehingga penduduk ini yang menjadikan daerah lebih berkembang terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh penduduk itu daerah tersebut, semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi daerahnya.<sup>76</sup>

Secara luas Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,52 Km<sup>2</sup> yang ditetapi oleh 1.554.997 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 269 orang per Km<sup>2</sup>. Dari seluruh kecamatan yang ada pada Kabupaten Banyuwangi yang terdapat tingkat kepadatan yang tinggi adalah Kecamatan Banyuwangi Sebanyak 3.522

---

<sup>75</sup> suci rahmatika Cahyaningsipratiwi, Karyati, and Sri Sarminah, "Suhu Dan Kelembapan Tanah Pada Posisi Topografi Dan Kedalaman Tanah Berbeda Di Taman Sejati Kota Samarinda," *Jurnal Agrifor* XX (2021): 189–98.

<sup>76</sup> Imelda Hutasoit, "Pengantar Ilmu Kependudukan," 2016.

orang per km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat yang paling rendah adalah Kecamatan Tegaldlimo sebanyak 46 per km<sup>2</sup>.<sup>77</sup>

**Tabel 4.2**  
**Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk hasil proyeksi penduduk**

| No.           | Kecamatan   | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Persentase thd Luas Kabupaten | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.            | Pesanggaran | 802,5                           | 13,9                          | 48.412          | 60                 |
| 2.            | Siliragung  | 95,15                           | 1,6                           | 44.390          | 467                |
| 3.            | Bangorejo   | 137,43                          | 2,4                           | 59.442          | 433                |
| 4.            | Puworharjo  | 200,3                           | 3,5                           | 64.969          | 324                |
| 5.            | Tegaldlimo  | 1.341,12                        | 23,2                          | 61.176          | 46                 |
| 6.            | Muncar      | 146,07                          | 2,5                           | 128.924         | 883                |
| 7.            | Cluring     | 97,44                           | 1,7                           | 70.049          | 719                |
| 8.            | Gambiran    | 66,77                           | 1,2                           | 58.412          | 875                |
| 9.            | Tegalsari   | 65,23                           | 1,1                           | 46.161          | 708                |
| 10.           | Glenmore    | 421,98                          | 7,3                           | 69.471          | 165                |
| 11.           | Kalibaru    | 406,76                          | 7,0                           | 61.182          | 150                |
| 12.           | Genteng     | 82,34                           | 1,4                           | 83.123          | 1.010              |
| 13.           | Srono       | 100,77                          | 1,7                           | 87.209          | 865                |
| 14.           | Rogojampi   | 102,33                          | 1,8                           | 92.358          | 903                |
| 15.           | Kabat       | 107,48                          | 1,9                           | 67.137          | 625                |
| 16.           | Singojuruh  | 59,89                           | 1,0                           | 45.242          | 755                |
| 17.           | Sempu       | 174,83                          | 3,0                           | 71.281          | 408                |
| 18.           | Songgon     | 301,84                          | 5,2                           | 50.275          | 167                |
| 19.           | Glagah      | 76,75                           | 1,3                           | 33.992          | 443                |
| 20.           | Licin       | 169,25                          | 2,9                           | 27.878          | 165                |
| 21.           | Banyuwangi  | 30,13                           | 0,5                           | 106.000         | 3.518              |
| 22.           | Giri        | 21,31                           | 0,4                           | 28.510          | 1.338              |
| 23.           | Kalipuro    | 310,03                          | 5,4                           | 76.178          | 246                |
| 24.           | Wongsorejo  | 464,8                           | 8,0                           | 74.307          | 160                |
| <b>Jumlah</b> |             | 5.782,50                        | 100                           | 1.556.078       | 269                |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi*

Dari hasil sensus penduduk masih terlihat bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui kecamatan yang terbananyak yaitu Kecamatan Muncar sebesar 128.924 atau 8,2%. Laju

<sup>77</sup> “Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi,” accessed December 1, 2024, <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cccd8b3057963bcd88751a417/kabupaten-banyuwangi-dalam-angka-2024.html>.

pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa cepat jumlah penduduk suatu daerah bertambah atau berkurang pada waktu tertentu. Pada Kabupaten Banyuwangi laju pertumbuhannya per tahun selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 0,44% yang menunjukkan tren positif sehingga setiap tahunnya jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan yang terdiri dari tingkat kelahiran yang tinggi, migrasi, dan peningkatan kualitas hidup.

#### 4. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

Visi Kabupaten Banyuwangi yang dapat diwujudkan selama periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2024-2029 dengan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah, yaitu: “TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKAH”

Misi upaya untuk mewujudkan visi tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan

Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.

4. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

## B. Penyajian Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Pada statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui data pada variabel seperti, mean, nilai minimum, nilai maximum dan standart deviasi. Adapun hasil dari pengujian statistik deskriptif yang menggunakan aplikasi olah data SPSS, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Uji Statistik Deskriptif**

| <b>Descriptive Statistics</b> |   |                 |                 |                   |                   |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                               | N | Minimum         | Maximum         | Mean              | Std. Deviation    |
| Pajak Daerah                  | 5 | 191631105712.00 | 282348613611.00 | 221683917318.6000 | 37208233957.56944 |
| Retribusi Daerah              | 5 | 42989558016.00  | 48292208982.00  | 45543884490.2000  | 2435557267.00124  |
| Jumlah Penduduk               | 5 | 1718462000.00   | 1780015000.00   | 1745092000.8000   | 23063000.93373    |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | 5 | 482740174377.00 | 567756888962.00 | 516593466789.2000 | 32451611638.59646 |
| Valid N (listwise)            | 5 |                 |                 |                   |                   |

Sumber: Diolah oleh SPSS

Berdasarkan dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa diperoleh gambaran nilai untuk masing-masing variabel, dimana mean untuk variabel

Pajak Daerah sebesar 221683917318,6 sedangkan Retribusi Daerah sebesar 45543884490,2 dan Jumlah Penduduk sebesar 1745092000,8 serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 516593466789,2. Sedangkan untuk standar deviasi yang diperoleh pada variabel pajak daerah sebesar 37082339557,5 untuk Retribusi Daerah adalah sebesar 2435557267,0 dan untuk Jumlah Penduduk sebesar 23063000,9 serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 32451611638,5.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelumnya sampai pada tahap pengujian regresi linier berganda, terlebih dahulu melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan adalah pengujian asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Pada uji normalitas tahap ini yang dapat digunakan untuk memperhatikan data yang diperoleh yang sudah terdistribusi secara normal atau tidak, karena regresi linier berganda dapat dianggap baik ketika data yang dapat terdistribusikan secara normal. Uji normalitas ini dapat ditentukan dengan memperhatikan nilai grafik histogram atau dengan *Kolmogorov Smirnov*. Pada penelitian ini dalam pengujian normalitas menekankan pada *Kolmogorov Smirnov* untuk semua variabel. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian *one sample kolmogorov smirnov* terdapat kriteria yaitu, pada nilai signifikansi sebesar 0,05. Sehingga, apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data

dianggap terdistribusi secara normal. Namun, apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data dianggap tidak terdistribusi secara normal. Adapun hasil yang diperoleh dari data yang ada melalui bantuan program SPSS, sebagai berikut:<sup>78</sup>

**Tabel 4.4.**  
**Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                          |                         |             | Unstandardized Residual |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| N                                        |                         |             | 5                       |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>         | Mean                    |             | .0000488                |
|                                          | Std. Deviation          |             | 7615766201.33926400     |
| Most Extreme Differences                 | Absolute                |             | .177                    |
|                                          | Positive                |             | .134                    |
|                                          | Negative                |             | -.177                   |
| Test Statistic                           |                         |             | .177                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                         |             | .200 <sup>d</sup>       |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup> | Sig.                    |             | .903                    |
|                                          | 99% Confidence Interval |             |                         |
|                                          |                         | Lower Bound | .896                    |
|                                          |                         | Upper Bound | .911                    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 200000

Sumber: Diolah oleh SPSS

Berdasarkan dari hasil data yang sudah diperoleh atas nilai hasil akhir pengujian menggunakan one sample kolmogorov smirnov sebesar 0,91 dengan itu dapat diartikan nilai yang dihasilkan lebih besar ( $>$ ) dibandingkan dari nilai signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa data dalam penelitian ini dapat terdistribusikan secara normal.

<sup>78</sup> Zahriyah et al., *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*.

Dengan demikian, data penelitian yang dimiliki memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi.

b. Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas digunakan untuk memperhatikan terdapat hubungan antara variabel independent satu dengan yang lain, dengan begitu model regresi yang dianggap baik apabila tidak terdapat kesalahan multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dapat dipastikan dengan nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)*, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu, apabila nilai *Varian Inflation Factor (VIF)*  $< 10,00$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  dianggap tidak terjadi multikolinearitas. Namun, apabila jika nilai *Varian Inflation Factor (VIF)*  $> 10,00$  dan nilai *tolerance*  $< 0,10$  dianggap terjadi kesalahan multikolinearitas. Sehingga untuk pengolahan data yang sudah didapat setelah itu diuji akan terdapat hasilnya untuk menentukan terjadi atau tidaknya multikolinearitas. Adapun hasil yang diperoleh melalui program SPSS, sebagai berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*.

**Tabel 4.5.**  
**Uji Multikolinearitas**

| Model            | Unstandardized Coefficients |                   | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|                  | B                           | Std. Error        | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)     | 1367047690920.541           | 1198268360554.556 |                           | 1.141 | .045 |                         |       |
| Pajak Daerah     | 1.079                       | .354              | 1.237                     | 3.048 | .022 | .335                    | 2.989 |
| Retribusi Daerah | 3.747                       | 6.231             | .281                      | .601  | .065 | .252                    | 3.971 |
| Jumlah Penduduk  | 722146.963                  | 857914.479        | .513                      | .842  | .055 | .148                    | 6.750 |

Sumber: Diolah oleh SPSS

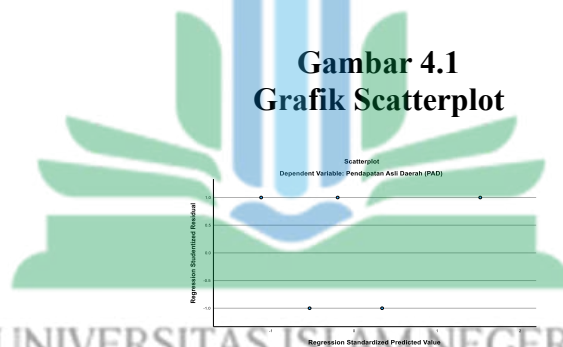
Berdasarkan dari hasil diatas dapat diperoleh nilai akhir dalam pengujian multikolinearitas dengan menentukan nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)*. Untuk nilai tolerance pada variabel Pajak Daerah atau  $X_1$  dapat diperoleh sebesar  $0,33 > 0,10$  dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* sebesar  $2,98 < 10,00$ . Pada variabel Retribusi Daerah atau  $X_2$  diperoleh sebesar  $0,25 > 0,10$  dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* adalah sebesar  $3,97 < 10,00$ . Sedangkan untuk variabel Jumlah Penduduk atau  $X_3$  dapat diperoleh sebesar  $0,14 > 0,10$  dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* sebesar  $6,75 < 10,00$ . Dari hasil yang terdapat diatas bahwa pada masing-masing variabel *independent* tidak memiliki kesalahan multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas yang dapat ditunjukkan dalam penelitian ini untuk memperhatikan terdapat kesamaan model regresi antara varian dan residual. Dalam uji heteroskedastisitas dapat menggunakan scatterplot. Terdapat kriteria untuk menentukan uji

heteroskedastisitas dengan dasar pengambilan keputusan adalah apabila tidak membentuk suatu pola tertentu pada titik plot dan penyebaran titik plot berada dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka dianggap tidak terjadi kesalahan heteroskedastisitas. Dan apabila titik membentuk suatu pola tertentu pada titik plot dan penyebaran titik plot, maka dianggap terjadi kesalahan heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedistisitas yang menguji dari data yang diperoleh untuk menentukan apakah terjadi atau tidak heteroskedastisitas. Terdapat hasil perolehan atas uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan program SPSS, sebagai berikut:<sup>80</sup>

**Gambar 4.1**  
**Grafik Scatterplot**



Sumber: Diolah oleh SPSS

Berdasarkan gambar diatas terdapat hasil yang dapat diperoleh pada pengujian heteroskestisitas bahwa titik plot menyebar yang berada diantara angka 0 dan sumbu Y, serta tidak membentuk suatu pola tertentu yang dapat menjadi kesalahan heteroskestisitas. Oleh karena itu, pada hasil pengujian heteroskestisitas pada scatterplot bahwa tidak ada

<sup>80</sup> Zahriyah et al., *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*.

kesalahan heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Maka dengan demikian dapat dilanjutkan untuk dilakukannya pada pengujian regresi linier berganda.

d. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi yang dapat ditunjukkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Dalam uji autokorelasi ini dalam pengujiannya menggunakan runs test, dengan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Sehingga untuk menentukan uji autokorelasi ini terdapat kesalahan atau tidak, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat autokorelasi. Sedangkan, jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat kesalahan autokorelasi. Adapun hasil dari pengujian autokorelasi yang menggunakan program SPSS, sebagai berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 4.6.**  
**Uji Autokorelasi – Runs Test**  
**Runs Test**

|                         | Unstandardized<br>Residual |
|-------------------------|----------------------------|
| Test Value <sup>a</sup> | 1473942304.47192           |
| Cases $<$ Test Value    | 2                          |
| Cases $\geq$ Test Value | 3                          |
| Total Cases             | 5                          |
| Number of Runs          | 4                          |
| Z                       | .109                       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | .913                       |

Sumber: Diolah oleh SPSS

<sup>81</sup> Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*.

Berdasarkan data diatas hasil pada pengelolaan data dalam uji autokorelasi dengan menggunakan *runs test* pada program SPSS. Untuk hasil menggunakan runs test sebesar 0,91 dapat diartikan bahwa nilai yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 sehingga dengan itu dapat dijelaskan bahwa data penelitian ini yang telah diujikan tidak terdapat autokorelasi.

### C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh secara kumulatif antara dua atau lebih variabel independen terhadap variable dependen. Terdapat variabel independennya (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk), sedangkan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ini adalah pengukuran perhitungan menggunakan program SPSS dan perolehan hasil, sebagai berikut:<sup>82</sup>

**Tabel 4.7.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |                   |                                |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |                   | Standardized Coefficients Beta | t     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error        |                                |       |      |
| 1 (Constant)              | 1367047690920.541           | 1198268360554.556 |                                | 1.141 | .045 |
| Pajak Daerah              | 1.079                       | .354              | 1.237                          | 4.408 | .022 |
| Retribusi Daerah          | 3.747                       | 6.231             | .281                           | .601  | .065 |
| Jumlah Penduduk           | 722146.963                  | 857914.479        | .513                           | .842  | .055 |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: Diolah oleh SPSS

<sup>82</sup> Zahriyah et al., *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*, 62–69.

Berdasarkan tabel diatas hasil dari persamaan model regresi linier berganda dengan rumus  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$  maka sebagai berikut:

$$Y = 1367047690920.541 + 1.079X_1 + 3.747X_2 - 722146.963X_3 + e$$

Adapun hasil dari persamaan model regresi linier berganda tersebut keterlibatannya, sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 1367047690920.541 menyatakan bahwa, jika nilai variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk) apabila nilainya konstan (tetap), maka pengaruh yang diberikan pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 1367047690920.541.
- b. Nilai  $\beta_1$  yang diperoleh adalah sebesar 1.079 menyatakan bahwa jika tingkat pajak daerah mengalami kenaikan satu tingkatan maka akan berdampak pada kenaikan pula untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan sebesar 1.079 dengan korelasi yang dihasilkan bernilai positif yang dianggap konstan (tetap) pada setiap variabel.
- c. Nilai  $\beta_2$  yang diperoleh adalah sebesar 3.747 menyatakan bahwa jika tingkat retribusi daerah mengalami kenaikan satu tingkatan dan variabel lain dianggap konstan (tetap) dengan itu akan berdampak pada kenaikan pula untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan sebesar 3.747 dengan korelasi yang positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- d. Nilai  $\beta_3$  yang diperoleh adalah sebesar 722146.963 menyatakan bahwa jika tingkat jumlah penduduk mengalami kenaikan satu tingkatan dan

variabel lain dianggap konstan (tetap) maka akan berdampak penurunan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 722146.963.

## 2. Uji Hipotesisi

### a. Uji Parsial (t)

Uji t ini digunakan untuk mengidentifikasi secara individu pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk) yang mempengaruhi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Pada pengelolaan data penelitian terdapat kriteria yang harus disesuaikan untuk dasar pengambilan keputusan yang akan dibandingkan antara thitung dan ttabel serta nilai signifikansi 0,05.

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk hasil uji t (parsial) yang dapat diperoleh dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8.**  
**Uji Parsial (t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model            | Unstandardized Coefficients |                   | Standardized Coefficients Beta | t     | Sig. |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------|
|                  | B                           | Std. Error        |                                |       |      |
| 1 (Constant)     | 1367047690920.541           | 1198268360554.556 |                                | 1.141 | .045 |
| Pajak Daerah     | 1.079                       | .354              | 1.237                          | 4.408 | .022 |
| Retribusi Daerah | 3.747                       | 6.231             | .281                           | .601  | .065 |
| Jumlah Penduduk  | 722146.963                  | 857914.479        | .513                           | .842  | .055 |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: Diolah oleh SPSS

Berdasarkan dari hasil pengujian parsial (uji t) diatas yang telah dipaparkan dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pada variabel pajak daerah yang diperoleh yaitu nilai signifikansi sebesar 0,022 sedangkan untuk nilai signifikansi yang diperoleh  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.
2. Pada variabel retribusi daerah yang diperoleh yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,065 sedangkan untuk nilai signifikansi yang diperoleh  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat berimplikasi bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.
3. Pada variabel jumlah penduduk yang diperoleh yaitu nilai signifikansi sebesar 0,055 sedangkan untuk nilai signifikansi yang diperoleh  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

b. Uji Simultan (f)

Uji F dapat digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang dapat diperoleh oleh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk) secara simultan terhadap variabel

dependen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)). Uji F dapat diketahui melalui perbandingan apabila nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dan signifikansi sebesar 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu:

- Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- Apabila nilai signifikansi sebesar  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Untuk hasil uji f (simultan) yang dapat diperoleh dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9.**  
**Uji Simultan (f)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares             | df | Mean Square                | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------------------|----|----------------------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 3980428812435311300000.000 | 3  | 1326809604145103800000.000 | 5.719 | .029 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 231999579333846430000.000  | 1  | 231999579333846430000.000  |       |                   |
|       | Total      | 4212428391769157700000.000 | 4  |                            |       |                   |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pajak Daerah , Retribusi Daerah

Sumber: Diolah SPSS

Berdasarkan dari hasil pengujian simultan (uji f) yang dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa secara simultan terhadap variabel independen pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan jumlah penduduk (X3) dengan ini secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,02 maka  $0,02 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

c. Uji Koefisien Determinasi

Pada uji koefisien determinasi ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan memperkirakan pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat nilai untuk koefisien determinasi berkisar  $0 \leq R^2 \leq 1$  dapat diketahui bahwa untuk varian dari setiap variabel independen semakin mampu untuk mengetahui variabel dependen jika angkanya mendekati angka satu. Untuk mengidentifikasi nilai dari uji koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan program SPSS, sebagai berikut:

**Tabel 4.10.**  
**Koefisien Determinasi**

| <b>Model Summary</b> |                   |          |                   |                            |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                    | .972 <sup>a</sup> | .945     | .780              | 15231532402.679            |

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Sumber: Diolah oleh SPSS

Berdasarkan dari hasil pengujian koefisien determinasi diatas bahwa nilai koefisien determinasi yang dihasilkan oleh variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) dengan nilai sebesar 78,0% sedangkan 22,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

**D. Pembahasan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyelesaikan rumusan masalah,

dengan menjelaskan temuan penelitian, serta juga menjelaskan implikasi penelitian. Maka dalam pembahasan ini dapat menjawab atas rumusan masalah dengan menjelaskan penafsiran temuan penelitian yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan pada analisis dan interpretasi secara parsial pada variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Pada hal ini dapat terbukti dengan hasil perhitungan SPSS 30, untuk nilai signifikasi sebesar 0,02 maka perolehan yang didapat yaitu nilai signifikasi yang dapat dihasilkan  $< 0,05$  maka dengan itu  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak.

Dapat diketahui Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk pemberlakuan otonomi daerah menuntut adanya kemandirian dalam pembangunan daerah dan kemandirian keuangan daerah, sedangkan itu dapat mengasumsikan dari kepuasan dan kesuksesan dari tingkat kontribusi dari pajak daerahnya. Semakin meningkat Pajak Daerah maka sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat juga.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) dan Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkat penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan semakin besar sumber pendanaan terhadap Pendapatan Asli Daerah ataupun sebaliknya semakin rendah penerimaan Pajak Daerah, maka akan semakin kecil sumber pendanaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan pada analisis dan interpretasi secara parsial pada variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Pada hal ini dapat terbukti dengan hasil perhitungan pada aplikasi SPSS 30, untuk nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,06 maka perolehan yang didapat nilai signifikasi yang dihasilkan  $> 0,05$  maka dengan itu  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Retribusi Daerah ini adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pembayaran retribusi yang didasarkan atas prestasi atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara

perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini dikarenakan sumbangsi Retribusi Daerah masih kurang terhadap jumlah pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan pada analisis dan interpretasi secara parsial pada variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Pada hal ini dapat terbukti dengan hasil perhitungan SPSS 30, untuk nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,055 maka perolehan yang didapat untuk nilai signifikasi yang dapat dihasilkan  $> 0,05$  maka dengan itu  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tidak selalu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Pada kurun waktu 5 tahun ini kurangnya aktivitas penduduk terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adanya pembatasan untuk keluar rumah karena ada virus *covid-19* sehingga aktivitas penduduk tidak seperti biasa untuk melakukan usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkurang,

dengan adanya hal ini Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariska Oktiani, Novie Al Muhariah (2021) dalam penelitian Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan daerah utama yang diperhitungkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk sumber keuangan utama suatu daerah yang berasal dari dalam daerah tersebut sendiri. Pada dasarnya suatu daerah dapat memiliki tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu dengan adanya peningkatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk akan sangat mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali pendanaan dalam otonomi daerah.

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas yang telah dilakukan pada analisis dan interpretasi secara simultan pada variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) Kabupaten Banyuwangi. Dapat diketahui untuk nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,02 dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 maka dengan ini  $0,02 < 0,05$ , sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak atau variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kencana, Aladin, Rosy Armaini (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu. Sehingga hal ini berarti secara teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terhadap alur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah untuk sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik yang didapat dari aktivitas penduduk untuk pembayaran Pajak Daerah oleh wajib pajak. Sedangkan pemungutan Retribusi Daerah untuk sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik dalam pemungutan yang dilakukan oleh daerah bagi kepentingan pribadi maupun badan, namun Retribusi Daerah melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi yang disertai dengan aktivitas penduduk. Sehingga dalam hal ini dari pemungutan pajak dan retribusi daerah yang maksimal ini sampai dengan penyeteran, pelaporan dan perhitungan, verifikasi, dan validasi yang berjalan dengan cukup baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk sumber pendanaan dari dalam daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan bahwa Pajak Daerah termasuk penerimaan utama pendapatan yang dari dalam daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kontribusi wajib pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan sumbangsi Retribusi Daerah masih kurang terhadap jumlah pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pembayaran retribusi yang didasarkan atas prestasi atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya.
3. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan kurangnya aktivitas penduduk terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adanya pembatasan untuk keluar rumah karena ada virus *covid-19* sehingga aktivitas penduduk tidak seperti biasa untuk

melakukan usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkurang.

4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Pada dasarnya suatu daerah dapat memiliki tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu dengan adanya peningkatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk akan sangat mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran bagi penelitian selanjutnya, adalah:

- a. Untuk dapat meningkatkan Pajak Daerah yang dapat digunakan untuk kepuasan dan kesuksesan tingkat pajak daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Pemerintah Daerah agar selalu meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan Retribusi Daerah sehingga dapat menambahkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian yang belum dibahas dalam penelitian ini yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Dearah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Revoldai. “Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.” *Journal of Applied Managerial Accounting* 4, no. 1 (2020): 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>.
- Alhusain, Achmad Sani, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, and Lisnawati. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, Vikie A, and George M. V. Kawung. “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatanasli Daerah (PAD) Di Kota Sorong.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015): 732.
- Astuti, Hidyanti Endang. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2017-2021).” *JAF- Journal of Accounting and Finance* 1, no. 01 (2023): 87.
- Banyuwangi, BPKAD Kab. “LKPD 2019 Setelah Audited,” 2019.
- Banyuwangi, BPKAD Kab. “LKPD 2020 Setelah Audited,” 2020.
- Banyuwangi, BPKAD Kab. “LKPD 2021 Setelah Audited,” 2021.
- Banyuwangi, BPKAD Kab. “LKPD 2022 Setelah Audited,” 2022.
- Banyuwangi, BPKAD Kab. “LKPD 2023 Setelah Audited,” 2023.
- Banyuwangi, Peraturan Bupati Kabupaten. “KONSIDERAN PERBUP - 2023.Pdf,” n.d.
- BPK. “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.,” 2006.
- “BPS Kabupaten Banyuwangi.” Accessed June 11, 2024. <https://banyuwangikab.bps.go.id/>.
- Cahyaningsipratiwi, suci rahmatika, Karyati, and Sri Sarminah. “Suhu Dan Kelembapan Tanah Pada Posisi Topografi Dan Kedalaman Tanah Berbeda Di Taman Sejati Kota Samarinda.” *Jurnal Agrifor* XX (2021): 189–98.
- çimen, sabri, Faiz Albar Nasution, and Mokhammad Samsul Arif. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Surabaya.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 12, no. 2 (2020): 6.

Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, and Samino Hendriyanto. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2022): 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>.

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS, 2018.

“Geografi Daerah Banyuwangi.” Accessed November 30, 2024. <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/geografi>.

Hamidah, Junaidi, Novien Rialdy, Edy Suhartono, Amusiana, Wildoms Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, and Rama Nugraha Irawan Surayuda. *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Handayani, Fitri, Juliandi Sahputra, and Natassia Widjaja. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 -2022” 5, no. 2 (2024): 7043–53.

Hutasoit, Imelda. “Pengantar Ilmu Kependudukan,” 2016.

Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, 2022.

Iryanie, Phaurela Artha Wulandari dan Emy. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish, 2018.

Jannah, Bambang Perastyo dan Lina miftahul. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Rajagrafindo Persada. Vol. 3, 2016.

Jember, BPKAD Kab. “LKPD-2023 KABUPATEN JEMBER.Pdf,” n.d.

“Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.” Accessed December 1, 2024. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cccd88751a417/kabupaten-banyuwangi-dalam-angka-2024.html>.

Kementrian Keuangan RI. “Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)* (*Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id*) 20 (2017).

Kencana, Tiara, Aladin Aladin, and Rosy Armaini. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 08 (2022): 1144–49. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>.

Khusaini, Moh. *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2018.

"Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi." Accessed December 1, 2024. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyuwangi--2023.html>.

Lukitawati, LiaJuhriah. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)* 1, no. 2 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>.

Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.

Mauliyah, Nur Ika, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, and Luluk Nur Khotimah. "Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember." *Jurnal Bisnis Manajemen* 1, no. 1 (2023).

Mauliyah, Nur Ika, Okta Ayu Lestari, Hilda Aderia Husaini, and Muhammad Raziv Aulia Effendi. "Upaya Mendorong Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT PPD Jember Melalui Layanan Unggulan Kantor Bersama Samsat Jember." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)* 2, no. 1 (2023).

Meinanda, Rizka Famela, and Annisa Yuniar Larasati. "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* 15, no. 2 (2021): 7–8.

Meyla, Audy Yosi, Desy Puspita Arum, and Devi Hardianti Rukmana. "Prosedur Pelayanan Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Teratai Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 203–8.

Muhammad Idris Patarai. *KINERJA KEUANGAN DAERAH*. A. Emil Mattotorang, n.d.

- Nababan, Hardy Wiguna. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan." *Skripsi, Universitas Medan Area*, 2020, 8–20.
- Nasir, Muhammad Safar. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Nurhayati. *Pajak Daerah*. CV. Dalni Bintang, n.d.
- Oktiani, Ariska. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 16–35.
- Pasaribu, Benny, Aty Herawati, Kabul Wahyono Utomo, and Rizqon Halal Syah Aji. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*, 2022.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Cv. Wade Group, 2017.
- R. Agoes Kamaroellah. *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing, n.d.
- Rais, Wendi, Dinas Pendidikan, Provinsi Kepulauan, and Bangka Belitung. "Asumsi Dalam Ilmu." *JEM: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang* 6, no. 1 (2020): 74–82.
- Rinanda, Rendi, Wan Alamsyah, and Defry Basrin. "Analisis Topografi Dan Kerusakan Jalan Di Kecamatan Langsa Baro Dengan SIG." *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi* 6, no. 2 (2023): 147–57. <https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.4510>.
- Rizki, Sri Amelia, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3269>.
- Roesminingsih, Maria Veronika, Monica Widyaswari, Rofik Jalal Rosyanafi, and Fahmi Zakariyah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.
- Romlah, Siti, Ulva Herlinza Agustin, Winayatun Azizah, and Adil Siswanto. "Implementasi Aplikasi Jember-Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) Dalam Menunjang Keberhasilan Layanan Kependudukan." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 3 (2024): 158–63. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.233>.

- Ryka, Hamriani, Martheana Kencanawati, and Abdul Syahid. "Sistem Informasi Geografis (GIS) Dengan Arcgis Dalam Pemanfaatan Analisis Banjir Di Kelurahan Sepinggan." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil TRANSUKMA* 3, no. 1 (2020): 42–51. <https://doi.org/10.36277/transukma.v3i1.70>.
- Sabyan, Muhammad, and Iqra Wiarta. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 01 (2024): 179–85.
- Satyaninrum, Ika Rahayu, Jemi Pabisangan Tahirs, Bertholomeus Jawa Bhaga, Petrus Kpalet, Nurlaila Agustikawati, Yuniansyah, and Siti Aisyah. *Metodologi Penelitian*. Cendekia Publisher, 2022.
- Sayidah, Nur. *METODOLOGI PENELITIAN Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Jawara, n.d.
- Sigit Hermawan, and Amirullah, *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Sofiyatul Madaniyah, Nurul Setianingrum, and Retna Anggitaningsih. "Pengaruh Service Quality Dan Kualitas Produk Tabungan Haji Terhadap Loyalitas Nasabah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1732>.
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (2020): 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bndung: Alfbeta 2016.
- "Surat Al-Isra' Ayat 36: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed January 21, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. jember: IAIN Jember, 2020.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Pengantar Statistika (Edisi Ketiga): Cara Mudah Memahami Statistika*. Bumi Aksara, 2020.

Yam, Jim Hoy, and Ruhiyat Taufik. "Hipotesis Penelitian Kuantitatif." *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 96–102. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>.

Yenny, Nanda Fitri, and Khairil Anwar. "Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>.

Zahriyah, Aminatus, Suprianik, Agung Parmono, and Mustofa. *Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Mandala Press, 2021.



### MATRIKS PENELITIAN

| JUDUL PENELITIAN                                                                                                         | VARIABEL                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR VARIABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMBER DATA                                                                                             | METODE PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                   | HIPOTESIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUMUSAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. | Variabel Independen (Variabel Bebas):<br>1. Pajak Daerah (X1)<br>2. Retribusi Daerah (X2)<br>3. Jumlah Penduduk (X3)<br>Variabel Dependen (Variabel terikat):<br>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) | 1. Pajak Daerah yaitu:<br>a. Inflasi<br>b. Jumlah Penduduk<br>c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<br>2. Retribusi Daerah yaitu:<br>a. Efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi daerah<br>b. Jumlah penerimaan retribusi daerah<br>c. Jumlah wajib pajak<br>3. Jumlah Penduduk yaitu:<br>a. Laju pertumbuhan penduduk<br>b. Proporsi penduduk perkotaan dan pedesaan | Data sekunder yang dapat bersumber dari:<br>a. LKPD Kabupaten Banyuwangi<br>b. BPS Kabupaten Banyuwangi | 1. Metode penelitian kuantitatif.<br>2. Jenis penelitian menggunakan penelitian Deskriptif.<br>3. Teknik analisis data: Analisis Regresi Linier Berganda.<br>4. Teknik pengumpulan data: Data sekunder dari LKPD Kabupaten Banyuwangi dan BPS Kabupaten Banyuwangi. | H <sub>a</sub> : Terdapat pengaruh pajak daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.<br>H <sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh pajak daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.<br>H <sub>b</sub> : Terdapat pengaruh retribusi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.<br>H <sub>1</sub> : Tidak terdapat pengaruh retribusi daerah dalam | 1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?<br>2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?<br>3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?<br>4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi? |

|  |  |                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>c. Angka ketergantungan antara usis non-produktif dengan produktif</p> |  | <p>pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>H<sub>c</sub>: Terdapat pengaruh jumlah penduduk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>H<sub>2</sub>: Tidak terdapat pengaruh jumlah penduduk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>H<sub>d</sub>: Pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>Banyuwangi.</p> <p>H<sub>4</sub>: Pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara simultan tidak berpengaruh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi.</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adillah Miftahul Ni'mah  
Nim : 214105030039  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ada kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 Februari 2025  
Saya yang menyatakan



Adillah Miftahul Ni'mah  
NIM. 214105030039

LAPORAN KEUANGAN  
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                   | Ref.          | Anggaran 2019        | Realisasi 2019       | %      | Realisasi 2018       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                        |               |                      |                      |        |                      |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                            | 5.1.1.1.1     |                      |                      |        |                      |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                  | 5.1.1.1.1.a   | 209.864.573.340,00   | 196.835.027.082,59   | 93,79  | 178.917.948.412,33   |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                              | 5.1.1.1.1.b   | 55.846.898.733,00    | 48.292.208.982,40    | 86,47  | 45.463.161.118,00    |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan             | 5.1.1.1.1.c   | 15.602.369.000,00    | 16.659.277.057,90    | 106,77 | 15.169.787.750,70    |
| 6   | Lain-Lain PAD yang Sah                                                   | 5.1.1.1.1.d   | 236.263.150.524,46   | 233.904.659.559,19   | 99,00  | 210.516.051.934,15   |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                                  |               | 517.576.991.597,46   | 495.691.172.682,08   | 95,77  | 450.066.949.215,18   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                               | 5.1.1.1.2     |                      |                      |        |                      |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>                        | 5.1.1.1.2.a   |                      |                      |        |                      |
| 10  | Dana Bagi Hasil Pajak                                                    | 5.1.1.1.2.a.1 | 50.805.538.000,00    | 33.532.261.199,00    | 66,00  | 46.077.600.987,00    |
| 11  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                         | 5.1.1.1.2.a.2 | 142.793.461.660,00   | 129.980.096.204,00   | 91,03  | 115.412.543.995,00   |
| 12  | Dana Alokasi Umum                                                        | 5.1.1.1.2.a.3 | 1.438.463.198.000,00 | 1.438.463.198.000,00 | 100,00 | 1.375.784.247.000,00 |
| 13  | Dana Alokasi Khusus                                                      | 5.1.1.1.2.a.4 | 473.253.354.000,00   | 403.289.292.560,00   | 85,22  | 423.717.990.705,00   |
| 14  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s/d 13) |               | 2.105.315.551.660,00 | 2.005.264.847.963,00 | 95,25  | 1.960.992.382.687,00 |
| 15  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                                 | 5.1.1.1.2.b   |                      |                      |        |                      |
| 16  | Dana Otonomi Khusus                                                      |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 17  | Dana Penyesuaian                                                         | 5.1.1.1.2.b   | 272.683.821.000,00   | 271.891.827.400,00   | 99,71  | 242.207.412.850,00   |
| 18  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16 s/d 17)          |               | 272.683.821.000,00   | 271.891.827.400,00   | 99,71  | 242.207.412.850,00   |
| 19  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                                      | 5.1.1.1.2.c   |                      |                      |        |                      |
| 20  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                              | 5.1.1.1.2.c.1 | 184.272.146.022,00   | 236.071.359.365,00   | 128,11 | 203.200.571.328,00   |
| 21  | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                            |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 22  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi                                | 5.1.1.1.2.c.2 | 8.097.055.500,00     | 7.857.541.097,00     | 97,04  | 9.646.886.500,00     |
| 23  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 22)               |               | 192.369.201.522,00   | 243.928.900.462,00   | 126,80 | 212.847.457.828,00   |
| 24  | Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+23)                                    |               | 2.570.368.574.182,00 | 2.521.085.575.825,00 | 98,08  | 2.416.047.253.365,00 |
| 25  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                     | 5.1.1.1.3     |                      |                      |        |                      |
| 26  | Pendapatan Hibah                                                         | 5.1.1.1.3     | 130.378.160.000,00   | 126.505.875.606,25   | 97,03  | 131.529.815.766,36   |
| 27  | Pendapatan Dana Darurat                                                  |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 28  | Pendapatan Lainnya                                                       |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 29  | Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (26 s/d 28)                         |               | 130.378.160.000,00   | 126.505.875.606,25   | 97,03  | 131.529.815.766,36   |
| 30  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+24+29)</b>                                       |               | 3.218.323.725.779,46 | 3.143.282.624.113,33 | 97,67  | 2.997.644.018.346,54 |
| 31  | <b>BELANJA</b>                                                           | 5.1.1.2       |                      |                      |        |                      |
| 32  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                   | 5.1.1.2.1     |                      |                      |        |                      |
| 33  | Belanja Pegawai                                                          | 5.1.1.2.1.a   | 1.244.352.223.605,14 | 1.181.297.068.018,67 | 94,93  | 1.185.271.560.490,67 |
| 34  | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 5.1.1.2.1.b   | 897.763.013.948,00   | 826.714.837.347,57   | 92,09  | 676.695.287.639,77   |
| 35  | Belanja Bunga                                                            |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 14.836.209.103,80    |
| 36  | Belanja Subsidi                                                          |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 37  | Belanja Hibah                                                            | 5.1.1.2.1.c   | 77.103.400.000,00    | 63.169.340.000,00    | 81,93  | 61.221.365.000,00    |
| 38  | Belanja Bantuan Sosial                                                   | 5.1.1.2.1.d   | 40.916.005.026,83    | 16.726.803.000,00    | 40,88  | 7.396.464.800,00     |
| 39  | Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 38)                                       |               | 2.260.134.642.579,77 | 2.087.908.048.366,24 | 92,38  | 1.945.420.887.034,24 |
| 40  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                     | 5.1.1.2.2     |                      |                      |        |                      |
| 41  | Belanja Modal Tanah                                                      | 5.1.1.2.2.a   | 6.000.000.000,00     | 163.772.791,00       | 2,73   | 17.236.577.363,00    |
| 42  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        | 5.1.1.2.2.b   | 109.463.816.340,00   | 91.456.350.790,66    | 83,55  | 89.525.778.055,06    |
| 43  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                        | 5.1.1.2.2.c   | 165.974.845.020,00   | 135.227.013.081,81   | 81,47  | 109.612.985.076,37   |
| 44  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               | 5.1.1.2.2.d   | 331.428.499.841,00   | 302.054.399.032,42   | 91,14  | 260.540.727.453,93   |
| 45  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                         | 5.1.1.2.2.e   | 737.000.000,00       | 641.463.350,00       | 87,04  | 3.466.595.350,00     |
| 46  | Belanja Modal Aset Lainnya                                               |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 47  | Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)                                         |               | 613.604.161.201,00   | 529.542.999.045,89   | 86,30  | 480.382.663.296,36   |

| No. | Uraian                                                              | Ref.               | Anggaran 2019               | Realisasi 2019              | %               | Realisasi 2018              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 48  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                          | <b>5.1.1.2.3</b>   |                             |                             |                 |                             |
| 49  | Belanja Tak Terduga                                                 | 5.1.1.2.3          | 5.000.000.000,00            | 295.756.250,00              | 5,92            | 0,00                        |
| 50  | Jumlah Belanja Tak Terduga (49)                                     |                    | 5.000.000.000,00            | 295.756.250,00              | 5,92            | 0,00                        |
| 51  | <b>JUMLAH BELANJA (39+47+50)</b>                                    |                    | <b>2.878.738.803.780,77</b> | <b>2.617.746.803.662,13</b> | <b>90,93</b>    | <b>2.425.803.550.332,60</b> |
| 52  | <b>TRANSFER</b>                                                     | <b>5.1.1.2.4</b>   |                             |                             |                 |                             |
| 53  | <b>TRANSFER BAGI HASIL</b>                                          | <b>5.1.1.2.4.a</b> |                             |                             |                 |                             |
| 54  | Bagi Hasil Pajak                                                    |                    | 17.891.794.841,23           | 17.891.794.000,00           | 100,00          | 7.785.080.000,00            |
| 55  | Bagi Hasil Retribusi                                                |                    | 8.639.802.408,80            | 8.428.615.997,00            | 97,56           | 3.642.887.700,00            |
| 56  | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                                       |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 57  | <b>Jumlah Transfer Bagi Hasil (54 s/d 56)</b>                       |                    | <b>26.531.597.250,03</b>    | <b>26.320.409.997,00</b>    | <b>99,20</b>    | <b>11.427.967.700,00</b>    |
| 58  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                    | <b>5.1.1.2.4.b</b> |                             |                             |                 |                             |
| 59  | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa                                 |                    | 376.141.675.830,00          | 376.005.908.830,00          | 99,96           | 315.218.268.800,00          |
| 60  | Bantuan Keuangan Lainnya                                            |                    | 2.000.000.000,00            | 1.242.630.500,00            | 62,13           | 1.216.024.500,00            |
| 61  | <b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (59 s/d 60)</b>                 |                    | <b>378.141.675.830,00</b>   | <b>377.248.539.330,00</b>   | <b>99,76</b>    | <b>316.434.293.300,00</b>   |
| 62  | <b>JUMLAH TRANSFER (57+61)</b>                                      |                    | <b>404.673.273.080,03</b>   | <b>403.568.949.327,00</b>   | <b>99,73</b>    | <b>327.862.261.000,00</b>   |
| 63  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51+62)</b>                          |                    | <b>3.283.412.076.860,80</b> | <b>3.021.315.752.989,13</b> | <b>92,02</b>    | <b>2.753.665.811.332,60</b> |
| 64  | <b>SURPLUS/DEFISIT (30 - 63)</b>                                    | <b>5.1.1.3</b>     | <b>(65.088.351.081,34)</b>  | <b>121.966.871.124,20</b>   | <b>(187,39)</b> | <b>243.978.207.013,94</b>   |
| 65  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                   |                    |                             |                             |                 |                             |
| 66  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                        |                    |                             |                             |                 |                             |
| 67  | Penggunaan SILPA                                                    | 5.1.1.4            | 65.077.851.081,34           | 65.077.764.659,93           | 100,00          | 38.173.792.436,05           |
| 68  | Pencairan Dana Cadangan                                             |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 69  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                     |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 70  | Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank                    |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 218.860.543.368,65          |
| 71  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                        | 5.1.1.4            | 10.500.000,00               | 35.950.000,00               | 0,00            | 47.250.000,00               |
| 72  | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen                           |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 73  | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s/d 72)</b>                     |                    | <b>65.088.351.081,34</b>    | <b>65.113.714.659,93</b>    | <b>100,04</b>   | <b>257.081.585.804,70</b>   |
| 74  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                       |                    |                             |                             |                 |                             |
| 75  | Pembentukan Dana Cadangan                                           |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 76  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                  |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 77  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 435.981.941.737,30          |
| 78  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya                      |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 79  | Pemberian Pinjaman Daerah                                           |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 80  | Pengeluaran Investasi Non Permanen                                  |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                        |
| 81  | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s/d 80)</b>                    |                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>435.981.941.737,30</b>   |
| 82  | <b>PEMBIAYAAN NETTO (73-81)</b>                                     | <b>5.1.1.4</b>     | <b>65.088.351.081,34</b>    | <b>65.113.714.659,93</b>    | <b>100,04</b>   | <b>(178.900.355.932,60)</b> |
| 83  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (64+82)</b>                       | <b>5.1.1.5</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>187.080.585.784,13</b>   | <b>0,00</b>     | <b>65.077.851.081,34</b>    |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banyuwangi, Juni 2020  
**BUPATI BANYUWANGI,**  
  
**H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si**

LAPORAN KEUANGAN  
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                   | Ref.          | Anggaran 2020        | Realisasi 2020       | %      | Realisasi 2019       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                        |               |                      |                      |        |                      |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                            | 5.1.1.1.1     |                      |                      |        |                      |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                  | 5.1.1.1.1.a   | 202.184.678.748,00   | 191.631.106.771,59   | 95,73  | 196.835.027.062,59   |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                              | 5.1.1.1.1.b   | 69.387.651.672,33    | 45.631.411.364,00    | 65,70  | 48.292.203.962,40    |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan             | 5.1.1.1.1.c   | 24.386.721.728,16    | 20.688.815.797,40    | 84,77  | 16.659.277.067,30    |
| 6   | Lain-Lain PAD yang Sah                                                   | 5.1.1.1.1.d   | 271.241.340.364,00   | 224.810.841.414,23   | 82,88  | 233.904.659.559,19   |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                                  |               | 565.194.392.512,52   | 482.740.174.377,22   | 85,41  | 495.691.172.682,08   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                               | 5.1.1.1.2     |                      |                      |        |                      |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>                        | 5.1.1.1.2.a   |                      |                      |        |                      |
| 10  | Dana Transfer Umum                                                       | 5.1.1.1.2.a.1 | 1.486.362.819.686,00 | 1.463.798.618.108,00 | 97,93  | 1.601.975.555.403,00 |
| 11  | Dana Transfer Khusus                                                     | 5.1.1.1.2.a.2 | 399.717.403.000,00   | 368.357.055.686,00   | 92,16  | 403.289.292.580,00   |
| 12  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s/d 11) |               | 1.886.080.222.686,00 | 1.832.155.673.794,00 | 97,15  | 2.005.264.847.983,00 |
| 13  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                                 | 5.1.1.1.2.b   |                      |                      |        |                      |
| 14  | Dana Insentif Daerah                                                     | 5.1.1.1.2.b.1 | 94.924.042.000,00    | 94.924.042.000,00    | 100,00 | 72.212.116.000,00    |
| 15  | Dana Desa                                                                | 5.1.1.1.2.b.2 | 219.904.572.000,00   | 219.904.572.000,00   | 100,00 | 199.679.711.400,00   |
| 16  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (14 s/d 15)          |               | 305.828.614.000,00   | 305.828.614.000,00   | 100,00 | 271.891.827.400,00   |
| 17  | <b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                             | 5.1.1.1.2.c   |                      |                      |        |                      |
| 18  | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi                                      | 5.1.1.1.2.c.1 | 142.895.074.968,00   | 173.818.367.314,00   | 121,64 | 208.071.359.365,00   |
| 19  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi                                | 5.1.1.1.2.c.2 | 7.759.618.350,00     | 7.759.618.350,00     | 100,00 | 7.657.541.097,00     |
| 20  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (18 s/d 19)               |               | 150.654.693.318,00   | 181.577.985.664,00   | 120,53 | 243.928.900.462,00   |
| 21  | Jumlah Pendapatan Transfer (12+16+20)                                    |               | 2.335.563.530.016,00 | 2.339.531.673.666,00 | 99,32  | 2.521.085.575.825,00 |
| 22  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                     | 5.1.1.1.3     |                      |                      |        |                      |
| 23  | Pendapatan Hibah                                                         | 5.1.1.1.3.a   | 142.105.990.000,00   | 147.861.203.680,01   | 104,09 | 128.505.875.606,25   |
| 24  | Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan       | 5.1.1.1.3.b   | 171.750.000.000,00   | 298.078.107.246,00   | 173,55 | 0,00                 |
| 25  | Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s/d 24)                         |               | 313.855.990.000,00   | 445.939.400.926,01   | 142,09 | 128.505.875.606,25   |
| 26  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)</b>                                       |               | 3.234.613.912.528,52 | 3.260.231.248.972,23 | 101,04 | 3.143.282.624.113,33 |
| 27  | <b>BELANJA</b>                                                           | 5.1.1.2       |                      |                      |        |                      |
| 28  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                   | 5.1.1.2.1     |                      |                      |        |                      |
| 29  | Belanja Pegawai                                                          | 5.1.1.2.1.a   | 1.205.450.458.848,15 | 1.089.073.537.926,20 | 90,36  | 1.181.297.088.010,67 |
| 30  | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 5.1.1.2.1.b   | 864.322.539.142,40   | 807.356.193.667,78   | 93,41  | 826.714.837.347,57   |
| 31  | Belanja Bunga                                                            |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 32  | Belanja Subsidi                                                          |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 33  | Belanja Hibah                                                            | 5.1.1.2.1.c   | 204.658.671.059,00   | 180.849.655.351,00   | 88,37  | 84.411.970.500,00    |
| 34  | Belanja Bantuan Sosial                                                   | 5.1.1.2.1.d   | 41.348.000.000,00    | 25.873.727.000,00    | 62,59  | 15.726.803.000,00    |
| 35  | Jumlah Belanja Operasi (29 s/d 34)                                       |               | 2.315.781.267.049,55 | 2.102.953.113.847,04 | 90,81  | 2.089.150.878.866,24 |
| 36  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                     | 5.1.1.2.2     |                      |                      |        |                      |
| 37  | Belanja Modal Tanah                                                      | 5.1.1.2.2.a   | 790.784.000,00       | 51.868.800,00        | 6,56   | 183.772.791,00       |
| 38  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        | 5.1.1.2.2.b   | 118.142.528.418,10   | 117.624.202.615,00   | 99,73  | 91.458.350.790,66    |
| 39  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                        | 5.1.1.2.2.c   | 132.717.430.164,00   | 129.358.513.551,00   | 97,47  | 135.227.013.081,81   |
| 40  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               | 5.1.1.2.2.d   | 326.475.460.856,00   | 304.976.408.004,43   | 93,41  | 302.054.369.032,42   |
| 41  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                         | 5.1.1.2.2.e   | 3.893.238.945,00     | 1.186.038.070,00     | 30,46  | 841.403.260,00       |
| 42  | Jumlah Belanja Modal (37 s/d 41)                                         |               | 582.019.442.383,10   | 553.385.030.640,43   | 95,08  | 529.542.999.045,89   |

| No. | Uraian                                       | Ref.        | Anggaran 2020        | Realisasi 2020       | %       | Realisasi 2019       |
|-----|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 43  | BELANJA TAK TERDUGA                          | 5.1.1.2.3   |                      |                      |         |                      |
| 44  | Belanja Tak Terduga                          | 5.1.1.2.3   | 125.448.980.630,00   | 90.224.430.281,00    | 71,92   | 295.756.250,00       |
| 45  | Jumlah Belanja Tak Terduga (44)              |             | 125.448.980.630,00   | 90.224.430.281,00    | 71,92   | 295.756.250,00       |
| 46  | JUMLAH BELANJA (35+42+45)                    |             | 3.023.249.690.062,65 | 2.746.572.574.168,47 | 90,85   | 2.818.909.434.162,13 |
| 47  | TRANSFER                                     |             |                      |                      |         |                      |
| 48  | TRANSFER BAGI HASIL                          | 5.1.1.2.4   |                      |                      |         |                      |
| 49  | Transfer Bagi Hasil                          | 5.1.1.2.4.a | 26.536.587.250,00    | 26.390.119.500,00    | 99,45   | 26.320.409.997,00    |
| 50  | Jumlah Transfer Bagi Hasil (49)              |             | 26.536.587.250,00    | 26.390.119.500,00    | 99,45   | 26.320.409.997,00    |
| 51  | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN                    |             |                      |                      |         |                      |
| 52  | Belanja Bantuan Keuangan                     | 5.1.1.2.4.b | 367.808.211.000,00   | 367.676.211.000,00   | 99,95   | 379.005.908.830,00   |
| 53  | Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52)        |             | 367.808.211.000,00   | 367.676.211.000,00   | 99,95   | 379.005.908.830,00   |
| 54  | JUMLAH TRANSFER (50+53)                      |             | 394.344.808.250,00   | 394.066.330.500,00   | 99,93   | 402.326.318.827,00   |
| 55  | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46+54)          |             | 3.417.594.498.312,65 | 3.140.638.904.668,47 | 91,90   | 3.021.215.752.989,13 |
| 56  | SURPLUS/DEFISIT (25 - 55)                    | 5.1.1.3     | (192.980.585.784,13) | 127.592.344.303,75   | (66,73) | 121.966.871.124,20   |
| 57  | PEMBIAYAAN                                   |             |                      |                      |         |                      |
| 58  | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                        |             |                      |                      |         |                      |
| 59  | Penggunaan SIPA                              | 5.1.1.4     | 187.080.585.784,13   | 187.101.344.846,13   | 100,01  | 85.077.794.659,93    |
| 60  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    | 35.950.000,00        |
| 61  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (59 s/d 60)     |             | 187.080.585.784,13   | 187.101.344.846,13   | 100,01  | 85.113.714.659,93    |
| 62  | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                       |             |                      |                      |         |                      |
| 63  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah           | 5.1.1.4     | 4.100.000.000,00     | 4.100.000.000,00     | 100,00  | 0,00                 |
| 64  | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (63)           |             | 4.100.000.000,00     | 4.100.000.000,00     | 100,00  | 0,00                 |
| 65  | PEMBIAYAAN NETTO (61-64)                     | 5.1.1.4     | 182.980.585.784,13   | 183.001.344.846,13   | 100,01  | 85.113.714.659,93    |
| 66  | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (56+65)       | 5.1.1.5     | 0,00                 | 310.593.689.148,89   |         | 187.080.585.784,13   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

LAPORAN KEUANGAN  
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                          | Ref.          | Anggaran 2021               | Realisasi 2021              | %             | Realisasi 2020              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                               |               |                             |                             |               |                             |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                   | 5.1.1.1.1     |                             |                             |               |                             |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                         | 5.1.1.1.1.a   | 181.387.157.590,25          | 206.146.187.700,00          | 113,65        | 191.631.105.771,59          |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                                     | 5.1.1.1.1.b   | 59.601.764.895,27           | 43.211.935.541,00           | 72,50         | 45.631.411.394,00           |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                    | 5.1.1.1.1.c   | 23.161.685.641,60           | 21.491.551.361,34           | 92,79         | 20.666.815.797,40           |
| 6   | Lain-Lain PAD yang Sah                                                          | 5.1.1.1.1.d   | 241.740.467.061,14          | 249.172.279.778,86          | 103,074       | 224.810.841.414,23          |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>                                  |               | <b>505.891.075.188,26</b>   | <b>520.021.954.381,20</b>   | <b>102,79</b> | <b>482.740.174.377,22</b>   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                      | 5.1.1.1.2     |                             |                             |               |                             |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>                               | 5.1.1.1.2.a   |                             |                             |               |                             |
| 10  | Dana Transfer Umum                                                              | 5.1.1.1.2.a.1 | 1.460.275.494.000,00        | 1.622.205.084.853,00        | 111,089       | 1.463.768.018.106,00        |
| 11  | Dana Transfer Khusus                                                            | 5.1.1.1.2.a.2 | 448.974.160.000,00          | 360.120.635.534,00          | 80,2097       | 388.357.055.896,00          |
| 12  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s/d 11)</b> |               | <b>1.909.249.654.000,00</b> | <b>1.982.325.720.387,00</b> | <b>103,83</b> | <b>1.852.125.074.002,00</b> |
| 13  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                                        | 5.1.1.1.2.b   |                             |                             |               |                             |
| 14  | Dana Insentif Daerah                                                            | 5.1.1.1.2.b   | 42.442.282.000,00           | 42.442.282.000,00           | 100,00        | 94.924.042.000,00           |
| 15  | Dana Desa                                                                       | 5.1.1.1.2.b   | 220.080.459.000,00          | 220.080.459.000,00          | 100,00        | 210.904.572.000,00          |
| 16  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (14 s/d 15)</b>          |               | <b>262.522.741.000,00</b>   | <b>262.522.741.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>305.828.614.000,00</b>   |
| 17  | <b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                                    | 5.1.1.1.2.c   |                             |                             |               |                             |
| 18  | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi                                             | 5.1.1.1.2.c.1 | 170.818.367.314,00          | 247.238.037.389,00          | 144,74        | 173.818.367.314,00          |
| 19  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi                                       | 5.1.1.1.2.c.2 | 7.955.355.500,00            | 7.955.355.500,00            | 100,00        | 7.759.618.350,00            |
| 20  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (18 s/d 19)</b>               |               | <b>178.773.722.814,00</b>   | <b>255.193.392.889,00</b>   | <b>142,75</b> | <b>181.577.985.664,00</b>   |
| 21  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer (12+16+20)</b>                                    |               | <b>2.350.546.117.814,00</b> | <b>2.500.041.854.276,00</b> | <b>106,36</b> | <b>2.339.531.673.666,00</b> |
| 22  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                            | 5.1.1.1.3     |                             |                             |               |                             |
| 23  | Pendapatan Hibah                                                                | 5.1.1.1.3.a   | 145.301.890.800,00          | 145.516.896.475,63          | 100,15        | 147.881.293.680,01          |
| 24  | Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan              | 5.1.1.1.3.b   | 12.797.713.549,00           | 15.629.526.788,00           | 122,13        | 298.078.107.249,00          |
| 25  | <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s/d 24)</b>                         |               | <b>158.099.604.349,00</b>   | <b>161.146.423.263,63</b>   | <b>101,93</b> | <b>445.959.400.929,01</b>   |
| 26  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)</b>                                              |               | <b>3.014.536.797.351,26</b> | <b>3.181.210.231.920,83</b> | <b>105,53</b> | <b>3.268.231.248.972,23</b> |
| 27  | <b>BELANJA</b>                                                                  | 5.1.1.2       |                             |                             |               |                             |
| 28  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                          | 5.1.1.2.1     |                             |                             |               |                             |
| 29  | Belanja Pegawai                                                                 | 5.1.1.2.1.a   | 1.150.863.139.032,15        | 1.077.767.889.579,00        | 93,65         | 1.089.073.537.928,26        |
| 30  | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.1.1.2.1.b   | 910.282.783.632,00          | 812.104.772.920,36          | 89,21         | 807.356.193.567,78          |
| 31  | Belanja Bunga                                                                   |               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 32  | Belanja Subsidi                                                                 |               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 33  | Belanja Hibah                                                                   | 5.1.1.2.1.c   | 41.673.181.580,00           | 35.181.062.240,00           | 84,42         | 180.849.655.351,00          |
| 34  | Belanja Bantuan Sosial                                                          | 5.1.1.2.1.d   | 66.831.847.800,00           | 61.150.791.400,00           | 91,50         | 25.673.727.000,00           |
| 35  | <b>Jumlah Belanja Operasi (29 s/d 34)</b>                                       |               | <b>2.169.650.952.044,15</b> | <b>1.986.204.516.139,36</b> | <b>91,54</b>  | <b>2.102.953.113.847,04</b> |
| 36  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                            | 5.1.1.2.2     |                             |                             |               |                             |
| 37  | Belanja Modal Tanah                                                             | 5.1.1.2.2.a   | 250.000.000,00              | 0,00                        | 0,00          | 51.868.800,00               |
| 38  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 5.1.1.2.2.b   | 100.754.369.860,00          | 94.308.993.620,40           | 93,60         | 117.824.202.615,00          |
| 39  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                               | 5.1.1.2.2.c   | 156.085.853.153,00          | 148.719.626.588,21          | 95,28         | 129.356.513.551,00          |
| 40  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                      | 5.1.1.2.2.d   | 419.690.404.322,00          | 414.624.441.901,00          | 98,79         | 304.976.409.004,43          |
| 41  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                | 5.1.1.2.2.e   | 9.690.572.495,00            | 3.450.338.500,00            | 35,61         | 1.186.036.070,00            |
| 42  | <b>Jumlah Belanja Modal (37 s/d 41)</b>                                         |               | <b>686.471.199.830,00</b>   | <b>661.103.400.609,61</b>   | <b>96,30</b>  | <b>553.395.030.040,43</b>   |
| 43  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                                      | 5.1.1.2.3     |                             |                             |               |                             |
| 44  | Belanja Tak Terduga                                                             | 5.1.1.2.3     | 40.000.000.000,00           | 29.019.869.108,00           | 72,55         | 90.224.430.281,00           |
| 45  | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga (44)</b>                                          |               | <b>40.000.000.000,00</b>    | <b>29.019.869.108,00</b>    | <b>72,55</b>  | <b>90.224.430.281,00</b>    |
| 46  | <b>JUMLAH BELANJA (35+42+45)</b>                                                |               | <b>2.896.122.151.874,15</b> | <b>2.676.327.785.856,97</b> | <b>92,41</b>  | <b>2.746.572.574.168,47</b> |

| No. | Uraian                                          | Ref.        | Anggaran 2021               | Realisasi 2021              | %             | Realisasi 2020              |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 47  | <b>TRANSFER</b>                                 |             |                             |                             |               |                             |
| 48  | <b>TRANSFER BAGI HASIL</b>                      | 5.1.1.2.4   |                             |                             |               |                             |
| 49  | Transfer Bagi Hasil                             | 5.1.1.2.4.a | 21.013.403.477,00           | 21.013.403.477,00           | 100,00        | 26.390.119.500,00           |
| 50  | <b>Jumlah Transfer Bagi Hasil (49)</b>          |             | <b>21.013.403.477,00</b>    | <b>21.013.403.477,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>26.390.119.500,00</b>    |
| 51  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                |             |                             |                             |               |                             |
| 52  | Belanja Bantuan Keuangan                        | 5.1.1.2.4.b | 397.594.931.150,00          | 396.252.065.183,00          | 99,66         | 367.676.211.000,00          |
| 53  | <b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52)</b>    |             | <b>397.594.931.150,00</b>   | <b>396.252.065.183,00</b>   | <b>99,66</b>  | <b>367.676.211.000,00</b>   |
| 54  | <b>JUMLAH TRANSFER (50+53)</b>                  |             | <b>418.608.334.627,00</b>   | <b>417.265.468.660,00</b>   | <b>99,68</b>  | <b>394.066.330.500,00</b>   |
| 55  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46+54)</b>      |             | <b>3.314.730.486.501,15</b> | <b>3.093.593.254.516,97</b> | <b>93,33</b>  | <b>3.140.638.904.668,47</b> |
| 56  | <b>SURPLUS/DEFISIT (26 - 55)</b>                | 5.1.1.3     | <b>(300.193.689.149,89)</b> | <b>87.616.977.403,86</b>    | <b>-29,19</b> | <b>127.592.344.303,76</b>   |
| 57  | <b>PEMBIAYAAN</b>                               |             |                             |                             |               |                             |
| 58  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    |             |                             |                             |               |                             |
| 59  | Penggunaan SiLPA                                | 5.1.1.4     | 310.593.689.149,89          | 310.594.127.944,30          | 100,00        | 187.101.344.846,13          |
| 60  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah    |             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 61  | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (59 s/d 60)</b> |             | <b>310.593.689.149,89</b>   | <b>310.594.127.944,30</b>   | <b>100,00</b> | <b>187.101.344.846,13</b>   |
| 62  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   |             |                             |                             |               |                             |
| 63  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 5.1.1.4     | 10.400.000.000,00           | 10.400.000.000,00           | 100,00        | 4.100.000.000,00            |
| 64  | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (63)</b>       |             | <b>10.400.000.000,00</b>    | <b>10.400.000.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>4.100.000.000,00</b>     |
| 65  | <b>PEMBIAYAAN NETTO (61-64)</b>                 | 5.1.1.4     | <b>300.193.689.149,89</b>   | <b>300.194.127.944,30</b>   | <b>100,00</b> | <b>183.001.344.846,13</b>   |
| 66  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (56+65)</b>   | 5.1.1.5     | <b>0,00</b>                 | <b>387.811.105.348,16</b>   |               | <b>310.593.689.149,89</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



LAPORAN KEUANGAN  
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                   | Ref.          | Anggaran 2022        | Realisasi 2022       | %      | Realisasi 2021       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                        |               |                      |                      |        |                      |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                            | 5.1.1.1.1     |                      |                      |        |                      |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                  | 5.1.1.1.1.a   | 202.857.977.611,00   | 231.458.652.487,00   | 114,10 | 206.146.187.700,00   |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                              | 5.1.1.1.1.b   | 73.863.753.767,00    | 42.989.558.015,92    | 58,20  | 43.211.935.541,00    |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan             | 5.1.1.1.1.c   | 25.000.000.000,00    | 22.401.056.861,23    | 89,60  | 21.491.551.361,34    |
| 6   | Lain-Lain PAD yang Sah                                                   | 5.1.1.1.1.d   | 224.995.229.562,00   | 219.907.876.179,40   | 97,74  | 249.172.279.778,86   |
| 7   | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)                                  |               | 526.716.960.940,00   | 516.757.143.543,55   | 98,11  | 520.021.954.381,20   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                               | 5.1.1.1.2     |                      |                      |        |                      |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>                        | 5.1.1.1.2.a   |                      |                      |        |                      |
| 10  | Dana Transfer Umum                                                       | 5.1.1.1.2.a.1 | 1.521.068.753.000,00 | 1.580.662.835.905,00 | 103,92 | 1.622.205.084.853,00 |
| 11  | Dana Transfer Khusus                                                     | 5.1.1.1.2.a.2 | 568.074.614.000,00   | 486.112.885.050,00   | 85,57  | 360.120.635.534,00   |
| 12  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s/d 11) |               | 2.089.143.367.000,00 | 2.066.775.720.955,00 | 98,93  | 1.982.325.720.387,00 |
| 13  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                                 | 5.1.1.1.2.b   |                      |                      |        |                      |
| 14  | Dana Insentif Daerah                                                     | 5.1.1.1.2.b   | 43.122.557.000,00    | 43.122.557.000,00    | 100,00 | 42.442.282.000,00    |
| 15  | Dana Desa                                                                | 5.1.1.1.2.b   | 221.710.360.000,00   | 221.710.360.000,00   | 100,00 | 220.080.459.000,00   |
| 16  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (14 s/d 15)          |               | 264.832.917.000,00   | 264.832.917.000,00   | 100,00 | 262.522.741.000,00   |
| 17  | <b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                             | 5.1.1.1.2.c   |                      |                      |        |                      |
| 18  | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi                                      | 5.1.1.1.2.c.1 | 128.161.205.885,00   | 234.310.076.819,00   | 182,82 | 247.238.037.389,00   |
| 19  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi                                | 5.1.1.1.2.c.2 | 19.817.738.000,00    | 19.801.013.000,00    | 99,92  | 7.955.355.500,00     |
| 20  | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (18 s/d 19)               |               | 147.978.943.885,00   | 254.111.089.819,00   | 171,72 | 255.193.392.889,00   |
| 21  | Jumlah Pendapatan Transfer (12+16+20)                                    |               | 2.501.955.227.885,00 | 2.585.719.727.774,00 | 103,35 | 2.500.041.854.276,00 |
| 22  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                     | 5.1.1.1.3     |                      |                      |        |                      |
| 23  | Pendapatan Hibah                                                         | 5.1.1.1.3.a   | 100.711.556.775,19   | 99.271.161.818,50    | 98,57  | 145.516.896.475,63   |
| 24  | Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan       | 5.1.1.1.3.b   | 51.681.873.705,00    | 34.397.932.374,85    | 66,56  | 15.629.526.788,00    |
| 25  | Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s/d 24)                         |               | 152.393.430.480,19   | 133.669.094.193,35   | 87,71  | 161.146.423.263,63   |
| 26  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)</b>                                       |               | 3.181.065.619.305,19 | 3.236.145.965.510,90 | 101,73 | 3.181.210.231.920,83 |
| 27  | <b>BELANJA</b>                                                           | 5.1.1.2       |                      |                      |        |                      |
| 28  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                   | 5.1.1.2.1     |                      |                      |        |                      |
| 29  | Belanja Pegawai                                                          | 5.1.1.2.1.a   | 1.108.672.478.529,35 | 1.062.277.693.191,79 | 95,82  | 1.077.767.889.579,00 |
| 30  | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 5.1.1.2.1.b   | 1.097.643.197.154,00 | 997.830.709.483,68   | 90,91  | 812.104.772.920,36   |
| 31  | Belanja Bunga                                                            |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 32  | Belanja Subsidi                                                          |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 33  | Belanja Hibah                                                            | 5.1.1.2.1.c   | 195.931.934.500,00   | 161.377.103.878,00   | 82,36  | 35.181.062.240,00    |
| 34  | Belanja Bantuan Sosial                                                   | 5.1.1.2.1.d   | 14.821.000.000,00    | 12.373.020.000,00    | 83,48  | 61.150.791.400,00    |
| 35  | Jumlah Belanja Operasi (29 s/d 34)                                       |               | 2.417.068.610.183,35 | 2.233.858.526.553,47 | 92,42  | 1.986.204.516.139,36 |
| 36  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                     | 5.1.1.2.2     |                      |                      |        |                      |
| 37  | Belanja Modal Tanah                                                      | 5.1.1.2.2.a   | 14.403.700.000,00    | 9.999.788.000,00     | 69,43  | 0,00                 |
| 38  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        | 5.1.1.2.2.b   | 135.884.955.688,00   | 127.416.182.107,42   | 93,77  | 94.308.993.620,40    |
| 39  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                        | 5.1.1.2.2.c   | 128.391.724.795,00   | 125.005.108.897,12   | 97,36  | 148.719.626.588,21   |
| 40  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                               | 5.1.1.2.2.d   | 424.964.154.668,00   | 414.029.451.844,08   | 97,43  | 414.624.441.901,00   |
| 41  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                         | 5.1.1.2.2.e   | 8.165.564.154,00     | 2.792.480.670,00     | 34,20  | 3.450.338.500,00     |
| 42  | Jumlah Belanja Modal (37 s/d 41)                                         |               | 711.810.099.305,00   | 679.243.011.518,62   | 95,42  | 661.103.400.609,61   |
| 43  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                               | 5.1.1.2.3     |                      |                      |        |                      |
| 44  | Belanja Tak Terduga                                                      | 5.1.1.2.3     | 20.000.000.000,00    | 3.152.173.071,00     | 15,76  | 29.019.869.108,00    |
| 45  | Jumlah Belanja Tak Terduga (44)                                          |               | 20.000.000.000,00    | 3.152.173.071,00     | 15,76  | 29.019.869.108,00    |
| 46  | <b>JUMLAH BELANJA (35+42+45)</b>                                         |               | 3.148.878.709.488,35 | 2.916.253.711.143,09 | 92,61  | 2.676.327.785.856,97 |

| No. | Uraian                                          | Ref.        | Anggaran 2022        | Realisasi 2022       | %      | Realisasi 2021       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 47  | <b>TRANSFER</b>                                 |             |                      |                      |        |                      |
| 48  | <b>TRANSFER BAGI HASIL</b>                      | 5.1.1.2.4   |                      |                      |        |                      |
| 49  | Transfer Bagi Hasil                             | 5.1.1.2.4.a | 20.193.979.415,00    | 20.193.979.415,00    | 100,00 | 21.013.403.477,00    |
| 50  | Jumlah Transfer Bagi Hasil (49)                 |             | 20.193.979.415,00    | 20.193.979.415,00    | 100,00 | 21.013.403.477,00    |
| 51  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                |             |                      |                      |        |                      |
| 52  | Belanja Bantuan Keuangan                        | 5.1.1.2.4.b | 390.804.035.750,00   | 390.804.007.250,00   | 100,00 | 396.252.065.183,00   |
| 53  | Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52)           |             | 390.804.035.750,00   | 390.804.007.250,00   | 100,00 | 396.252.065.183,00   |
| 54  | <b>JUMLAH TRANSFER (50+53)</b>                  |             | 410.998.015.165,00   | 410.997.986.665,00   | 100,00 | 417.265.468.660,00   |
| 55  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46+54)</b>      |             | 3.559.876.724.653,35 | 3.327.251.697.808,09 | 93,47  | 3.093.593.254.516,97 |
| 56  | <b>SURPLUS/DEFISIT (26 - 55)</b>                | 5.1.1.3     | (378.811.105.348,16) | (91.105.732.297,19)  | 24,05  | 87.616.977.403,86    |
| 57  | <b>PEMBIAYAAN</b>                               |             |                      |                      |        |                      |
| 58  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    |             |                      |                      |        |                      |
| 59  | Penggunaan SilPA                                | 5.1.1.4     | 387.811.105.348,16   | 387.811.173.271,16   | 100,00 | 310.594.127.944,30   |
| 60  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.4     | 0,00                 | 1.536.081,17         |        |                      |
| 61  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah    |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |
| 62  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan (59 s/d 61)        |             | 387.811.105.348,16   | 387.812.709.352,33   | 100,00 | 310.594.127.944,30   |
| 63  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   |             |                      |                      |        |                      |
| 64  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 5.1.1.4     | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 100,00 | 10.400.000.000,00    |
| 65  | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (64)              |             | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 100,00 | 10.400.000.000,00    |
| 66  | <b>PEMBIAYAAN NETTO (62-65)</b>                 | 5.1.1.4     | 378.811.105.348,16   | 378.812.709.352,33   | 100,00 | 300.194.127.944,30   |
| 67  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (56+66)</b>   | 5.1.1.5     | 0,00                 | 287.706.977.055,14   |        | 387.811.105.348,16   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini



Banyuwangi, 25 Mei 2023

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTANDANI AZWAR ANAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAPORAN KEUANGAN

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian                                                                      | Ref.               | Anggaran 2023               | Realisasi 2023              | %             | Realisasi 2022              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                                           | <b>5.1.1.1</b>     |                             |                             |               |                             |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                               | <b>5.1.1.1.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 3   | Pendapatan Pajak Daerah                                                     | 5.1.1.1.1.1        | 244.490.000.000,00          | 282.348.613.611,00          | 115,48        | 231.458.652.487,00          |
| 4   | Pendapatan Retribusi Daerah                                                 | 5.1.1.1.1.2        | 78.710.000.000,00           | 47.594.308.518,17           | 60,47         | 42.989.558.015,92           |
| 5   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                | 5.1.1.1.1.3        | 24.950.000.000,00           | 22.910.845.984,92           | 91,83         | 22.401.056.861,23           |
| 6   | Lain-Lain PAD yang Sah                                                      | 5.1.1.1.1.4        | 228.396.564.200,00          | 214.903.120.848,07          | 94,09         | 219.907.876.179,40          |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>                              |                    | <b>576.546.564.200,00</b>   | <b>567.756.888.962,16</b>   | <b>98,48</b>  | <b>516.757.143.543,55</b>   |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                  | <b>5.1.1.1.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>                           | <b>5.1.1.1.2.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 10  | Dana Transfer Umum                                                          | 5.1.1.1.2.1.1      |                             |                             |               |                             |
| 11  | Dana Bagi Hasil Pajak                                                       | 5.1.1.1.2.1.1.1    | 115.162.625.121,00          | 115.162.625.121,00          | 100,00        | 124.879.109.105,00          |
| 12  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                            | 5.1.1.1.2.1.1.2    | 125.199.905.166,00          | 125.199.905.166,00          | 100,00        | 168.363.788.800,00          |
| 13  | Dana Alokasi Umum                                                           | 5.1.1.1.2.1.1.3    | 1.355.696.929.000,00        | 1.372.156.815.427,00        | 101,21        | 1.287.419.938.000,00        |
| 14  | <b>Jumlah Dana Transfer Umum (11 s/d 13)</b>                                |                    | <b>1.596.059.459.287,00</b> | <b>1.612.519.345.714,00</b> | <b>101,03</b> | <b>1.580.662.835.905,00</b> |
| 15  | Dana Transfer Khusus                                                        | 5.1.1.1.2.1.2      |                             |                             |               |                             |
| 16  | Dana Alokasi Khusus Fisik                                                   | 5.1.1.1.2.1.2.1    | 105.902.983.000,00          | 88.271.742.193,00           | 83,35         | 65.311.784.391,00           |
| 17  | Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                               | 5.1.1.1.2.1.2.2    | 460.039.546.000,00          | 439.132.949.304,00          | 95,46         | 420.801.100.659,00          |
| 18  | <b>Jumlah Dana Transfer Khusus (16 s/d 17)</b>                              |                    | <b>565.942.529.000,00</b>   | <b>527.404.691.497,00</b>   | <b>93,19</b>  | <b>486.112.885.050,00</b>   |
| 19  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (14+18)</b> |                    | <b>2.162.001.988.287,00</b> | <b>2.139.924.037.211,00</b> | <b>98,98</b>  | <b>2.066.775.720.955,00</b> |
| 20  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>                                    | <b>5.1.1.1.2.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 21  | Dana Insentif Daerah                                                        | 5.1.1.1.2.2.1      | 44.256.946.000,00           | 53.412.589.000,00           | 120,69        | 43.122.557.000,00           |
| 22  | Dana Desa                                                                   | 5.1.1.1.2.2.2      | 229.423.419.000,00          | 229.305.443.700,00          | 99,95         | 221.710.360.000,00          |
| 23  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (21 s/d 22)</b>      |                    | <b>273.680.365.000,00</b>   | <b>282.718.032.700,00</b>   | <b>103,30</b> | <b>264.832.917.000,00</b>   |
| 24  | <b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                                | <b>5.1.1.1.2.3</b> |                             |                             |               |                             |
| 25  | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi                                         | 5.1.1.1.2.3.1      | 213.174.660.372,00          | 313.446.272.275,00          | 147,04        | 234.310.076.819,00          |
| 26  | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi                                   | 5.1.1.1.2.3.2      | 18.334.102.700,00           | 18.149.002.700,00           | 98,99         | 19.801.013.000,00           |
| 27  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (25 s/d 26)</b>           |                    | <b>231.508.763.072,00</b>   | <b>331.595.274.975,00</b>   | <b>143,23</b> | <b>254.111.089.819,00</b>   |
| 28  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer (19+23+27)</b>                                |                    | <b>2.667.191.116.359,00</b> | <b>2.754.237.344.886,00</b> | <b>103,26</b> | <b>2.585.719.727.774,00</b> |
| 29  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                                        | <b>5.1.1.1.3</b>   |                             |                             |               |                             |
| 30  | Pendapatan Hibah                                                            | 5.1.1.1.3.1        | 8.590.000.000,00            | 7.822.476.000,00            | 91,06         | 99.271.161.818,50           |
| 31  | Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan          | 5.1.1.1.3.2        | 51.248.741.993,00           | 44.852.647.872,39           | 87,52         | 34.397.932.374,85           |
| 32  | <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (30 s/d 31)</b>                     |                    | <b>59.838.741.993,00</b>    | <b>52.675.123.872,39</b>    | <b>88,03</b>  | <b>133.669.094.193,35</b>   |
| 33  | <b>JUMLAH PENDAPATAN (7+28+32)</b>                                          |                    | <b>3.303.576.422.552,00</b> | <b>3.374.669.357.720,55</b> | <b>102,15</b> | <b>3.236.145.965.510,90</b> |
| 34  | <b>BELANJA</b>                                                              | <b>5.1.1.2</b>     |                             |                             |               |                             |
| 35  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                      | <b>5.1.1.2.1</b>   |                             |                             |               |                             |
| 36  | Belanja Pegawai                                                             | 5.1.1.2.1.1        | 1.066.207.057.242,49        | 1.056.209.784.687,69        | 99,06         | 1.062.277.693.191,79        |
| 37  | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 5.1.1.2.1.2        | 1.121.339.695.262,00        | 1.067.318.507.219,48        | 95,18         | 997.830.709.483,68          |
| 38  | Belanja Bunga                                                               | 5.1.1.2.1.3        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 39  | Belanja Subsidi                                                             | 5.1.1.2.1.4        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 40  | Belanja Hibah                                                               | 5.1.1.2.1.5        | 207.340.860.721,00          | 200.856.311.082,00          | 96,87         | 161.377.103.878,00          |
| 41  | Belanja Bantuan Sosial                                                      | 5.1.1.2.1.6        | 15.509.000.000,00           | 14.637.992.500,00           | 94,38         | 12.373.020.000,00           |
| 42  | <b>Jumlah Belanja Operasi (36 s/d 41)</b>                                   |                    | <b>2.410.396.613.225,49</b> | <b>2.339.022.595.489,17</b> | <b>97,04</b>  | <b>2.233.858.526.553,47</b> |
| 43  | <b>BELANJA MODAL</b>                                                        | <b>5.1.1.2.2</b>   |                             |                             |               |                             |
| 44  | Belanja Modal Tanah                                                         | 5.1.1.2.2.1        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 9.999.788.000,00            |
| 45  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                           | 5.1.1.2.2.2        | 168.180.432.930,00          | 158.309.393.578,00          | 94,13         | 127.416.182.107,42          |
| 46  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                           | 5.1.1.2.2.3        | 142.574.110.149,65          | 131.194.805.413,81          | 92,02         | 125.005.108.897,12          |
| 47  | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan                                  | 5.1.1.2.2.4        | 574.221.116.082,00          | 550.003.061.864,73          | 95,78         | 414.029.451.844,08          |
| 48  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                            | 5.1.1.2.2.5        | 6.356.788.120,00            | 2.021.087.070,00            | 31,79         | 2.792.480.670,00            |
| 49  | Belanja Modal Aset Lainnya                                                  | 5.1.1.2.2.6        | 2.160.062.000,00            | 2.052.245.939,00            | 95,01         | 0,00                        |
| 50  | <b>Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49)</b>                                     |                    | <b>893.492.509.281,65</b>   | <b>843.580.593.865,54</b>   | <b>94,41</b>  | <b>679.243.011.518,62</b>   |

| No. | Uraian                                          | Ref.             | Anggaran 2023               | Realisasi 2023              | %             | Realisasi 2022              |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 51  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                      | <b>5.1.1.2.3</b> |                             |                             |               |                             |
| 52  | Belanja Tak Terduga                             | 5.1.1.2.3        | 19.109.723.500,00           | 9.450.823.087,10            | 49,46         | 3.152.173.071,00            |
| 53  | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga (52)</b>          |                  | <b>19.109.723.500,00</b>    | <b>9.450.823.087,10</b>     | <b>49,46</b>  | <b>3.152.173.071,00</b>     |
| 54  | <b>JUMLAH BELANJA (42+50+53)</b>                |                  | <b>3.322.998.846.007,14</b> | <b>3.192.054.012.441,81</b> | <b>96,06</b>  | <b>2.916.253.711.143,09</b> |
| 55  | <b>TRANSFER</b>                                 | <b>5.1.1.3</b>   |                             |                             |               |                             |
| 56  | <b>TRANSFER BAGI HASIL</b>                      | <b>5.1.1.3.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 57  | Transfer Bagi Hasil                             | 5.1.1.3.1        | 20.193.959.600,00           | 20.193.959.600,00           | 100,00        | 20.193.979.415,00           |
| 58  | <b>Jumlah Transfer Bagi Hasil (57)</b>          |                  | <b>20.193.959.600,00</b>    | <b>20.193.959.600,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>20.193.979.415,00</b>    |
| 59  | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                | <b>5.1.1.3.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 60  | Belanja Bantuan Keuangan                        | 5.1.1.3.2        | 405.348.594.000,00          | 405.120.506.913,00          | 99,94         | 390.804.007.250,00          |
| 61  | <b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (60)</b>    |                  | <b>405.348.594.000,00</b>   | <b>405.120.506.913,00</b>   | <b>99,94</b>  | <b>390.804.007.250,00</b>   |
| 62  | <b>JUMLAH TRANSFER (58+61)</b>                  |                  | <b>425.542.553.600,00</b>   | <b>425.314.466.513,00</b>   | <b>99,95</b>  | <b>410.997.986.665,00</b>   |
| 63  | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (54+62)</b>      |                  | <b>3.748.541.399.607,14</b> | <b>3.617.368.478.954,81</b> | <b>96,50</b>  | <b>3.327.251.697.808,09</b> |
| 64  | <b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 63)</b>                | <b>5.1.1.4</b>   | <b>(444.964.977.055,14)</b> | <b>(242.699.121.234,26)</b> | <b>54,54</b>  | <b>(91.105.732.297,19)</b>  |
| 65  | <b>PEMBIAYAAN</b>                               | <b>5.1.1.5</b>   |                             |                             |               |                             |
| 66  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>5.1.1.5.1</b> |                             |                             |               |                             |
| 67  | Penggunaan SILPA                                | 5.1.1.5.1.1      | 287.706.977.055,14          | 287.706.977.055,14          | 100,00        | 387.811.173.271,16          |
| 68  | Penerimaan Pinjaman Daerah                      | 5.1.1.5.1.2      | 165.000.000.000,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 69  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.5.1.3      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 1.536.081,17                |
| 70  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah    | 5.1.1.5.1.4      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| 71  | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s/d 70)</b> |                  | <b>452.706.977.055,14</b>   | <b>287.706.977.055,14</b>   | <b>63,55</b>  | <b>387.812.709.352,33</b>   |
| 72  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                   | <b>5.1.1.5.2</b> |                             |                             |               |                             |
| 73  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 5.1.1.5.2.1      | 7.742.000.000,00            | 7.742.000.000,00            | 100,00        | 9.000.000.000,00            |
| 74  | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (73)</b>       |                  | <b>7.742.000.000,00</b>     | <b>7.742.000.000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>9.000.000.000,00</b>     |
| 75  | <b>PEMBIAYAAN NETTO (71-74)</b>                 | <b>5.1.1.5.3</b> | <b>444.964.977.055,14</b>   | <b>279.964.977.055,14</b>   | <b>62,92</b>  | <b>378.812.709.352,33</b>   |
| 76  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (64+75)</b>   | <b>5.1.1.6</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>37.265.855.820,88</b>    |               | <b>287.706.977.055,14</b>   |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini



**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2020-2022**

| Kelompok Umur | 2020      | 2021      | 2022      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 0-4           | 117 483   | 116 579   | 116 363   |
| 5-9           | 120 399   | 119 502   | 118 550   |
| 10-14         | 123 902   | 123 458   | 123 377   |
| 15-19         | 129 270   | 128 119   | 127 315   |
| 20-24         | 129 052   | 127 814   | 126 707   |
| 25-29         | 125 700   | 125 037   | 124 593   |
| 30-34         | 121 448   | 121 107   | 120 849   |
| 35-39         | 121 719   | 121 495   | 121 621   |
| 40-44         | 131 028   | 131 106   | 131 003   |
| 45-49         | 129 332   | 130 677   | 132 354   |
| 50-54         | 117 668   | 119 255   | 120 751   |
| 55-59         | 102 526   | 105 082   | 107 774   |
| 60-64         | 81 732    | 84 355    | 87 098    |
| 65-69         | 63 380    | 66 233    | 69 012    |
| 70-74         | 46 978    | 50 008    | 53 298    |
| 75+           | 46 497    | 48 635    | 51 066    |
| Banyuwangi    | 1 749 581 | 1 718 462 | 1 731 731 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

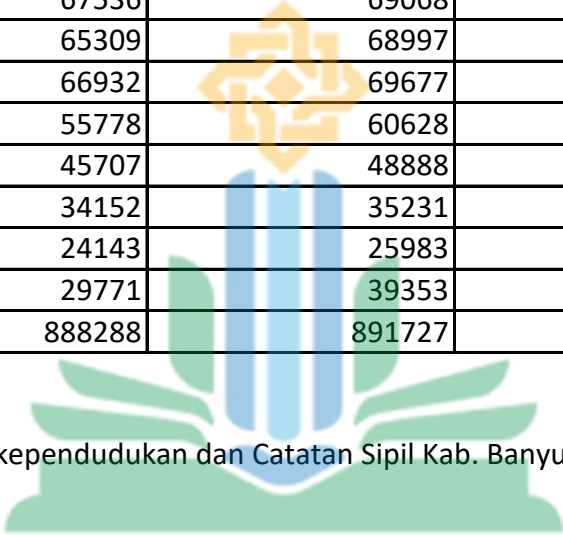
Keterangan : Diolah dari Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020

Jumlah Penduduk Tahun 2023

| Kelompok Umur | Penduduk (Laki-Laki)<br>(Ribu) | Penduduk<br>(Perempuan) (Ribu) | Penduduk (Laki-Laki +<br>Perempuan) (Ribu) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 0-4           | 54270                          | 50575                          | 104845                                     |
| 5-9           | 62791                          | 58349                          | 121140                                     |
| 10-14         | 67760                          | 63892                          | 131652                                     |
| 15-19         | 56693                          | 54834                          | 111527                                     |
| 20-24         | 70491                          | 67214                          | 137705                                     |
| 25-29         | 65023                          | 60531                          | 125554                                     |
| 30-34         | 61679                          | 58670                          | 120349                                     |
| 35-39         | 60253                          | 59837                          | 120090                                     |
| 40-44         | 67536                          | 69068                          | 136604                                     |
| 45-49         | 65309                          | 68997                          | 134306                                     |
| 50-54         | 66932                          | 69677                          | 136609                                     |
| 55-59         | 55778                          | 60628                          | 116406                                     |
| 60-64         | 45707                          | 48888                          | 94595                                      |
| 65-69         | 34152                          | 35231                          | 69383                                      |
| 70-74         | 24143                          | 25983                          | 50126                                      |
| 75+           | 29771                          | 39353                          | 69124                                      |
| Jumlah/Total  | 888288                         | 891727                         | 1780000                                    |

Catatan

Catatan/ Note : Data Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Nomor : B-1225 /Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 November 2024

Kepada Yth.

**Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember**

Jl. Mataram No.01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Adillah Miftahul Ni'mah  
NIM : 214105030039  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 25 – 26 November 2024 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

1. <https://bpkad.banyuwangikab.go.id/> (BPKAD Kab Banyuwangi)
2. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id> (BPS Kab Banyuwangi).

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

### **SURAT KETERANGAN**

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama     | : Adillah Miftahul Ni'mah                                                                                           |
| NIM      | : 214105030039                                                                                                      |
| Semester | : VIII (Delapan)                                                                                                    |
| Prodi    | : Akuntansi Syariah                                                                                                 |
| Judul    | : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi |

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 25 Novemver – 26 Desember 2025 dengan mengambil data dari:

1. <https://bpkad.banyuwangikab.go.id/> (BPKAD Kab. Banyuwangi)
2. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id> (BPS Kab. Banyuwangi)

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Februari 2025

A.n. Dekan  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I.

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No. | Hari/Tanggal     | Kegiatan                          |
|-----|------------------|-----------------------------------|
| 1.  | 12 Desember 2024 | Konsultasi mengenai Tabulasi Data |
| 2.  | 18 Desember 2024 | Mengolah Data                     |
| 3.  | 10 Januari 2025  | Menganalisis Data                 |
| 4.  | 16 Januari 2025  | Bimbingan Skripsi                 |
| 5.  | 22 Januari 2025  | Bimbingan Skripsi                 |
| 6.  | 31 Januari 2025  | ACC                               |

Jember, 26 Februari 2025

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M

## Lampiran Hasil SPSS

### Regression

#### Notes

|                        |                                |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output Created         |                                | 28-DEC-2024 12:45:45                                                                                                                                                                   |
| Comments               |                                |                                                                                                                                                                                        |
| Input                  | Active Dataset                 | DataSet1                                                                                                                                                                               |
|                        | Filter                         | <none>                                                                                                                                                                                 |
|                        | Weight                         | <none>                                                                                                                                                                                 |
|                        | Split File                     | <none>                                                                                                                                                                                 |
|                        | N of Rows in Working Data File | 5                                                                                                                                                                                      |
| Missing Value Handling | Definition of Missing          | User-defined missing values are treated as missing.                                                                                                                                    |
|                        | Cases Used                     | Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.                                                                                                            |
| Syntax                 |                                | REGRESSION<br>/MISSING LISTWISE<br>/STATISTICS COEFF<br>OUTS R ANOVA<br>/CRITERIA=PIN(.05)<br>POUT(.10)<br>TOLERANCE(.0001)<br>/NOORIGIN<br>/DEPENDENT Y<br>/METHOD=ENTER X1<br>X2 X3. |
| Resources              | Processor Time                 | 00:00:00,02                                                                                                                                                                            |
|                        | Elapsed Time                   | 00:00:00,07                                                                                                                                                                            |
|                        | Memory Required                | 3456 bytes                                                                                                                                                                             |
|                        | Additional Memory              | 0 bytes                                                                                                                                                                                |

### Required for Residual Plots

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

| Model | Variables Entered                                              | Variables Removed | Method  |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1     | Jumlah Penduduk , Pajak Daerah , Retribusi Daerah <sup>b</sup> |                   | . Enter |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. All requested variables entered.

#### Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .972 <sup>a</sup> | .945     | .780              | 15231532402.679            |

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk , Pajak Daerah , Retribusi Daerah

#### ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares             | df | Mean Square                | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------------------|----|----------------------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 3980428812435311300000.000 | 3  | 1326809604145103800000.000 | 5.719 | .296 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 231999579333846430000.000  | 1  | 231999579333846430000.000  |       |                   |
|       | Total      | 4212428391769157700000.000 | 4  |                            |       |                   |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk , Pajak Daerah , Retribusi Daerah

### Coefficients<sup>a</sup>

| Model |                  | Unstandardized Coefficients |               | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------|------|
|       |                  | B                           | Std. Error    | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)       | 1367047690920               | 1198268360554 |                           | 1.141 | .458 |
|       |                  | .541                        | .556          |                           |       |      |
|       | Pajak Daerah     | 1.079                       | .354          | 1.237                     | 3.048 | .202 |
|       | Retribusi Daerah | 3.747                       | 6.231         | .281                      | .601  | .655 |
|       | Jumlah Penduduk  | -722146.963                 | 857914.479    | -.513                     | -.842 | .555 |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### Statistics

|                |         | Pajak Daerah                 | Retribusi Daerah            | Jumlah Penduduk         | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|----------------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| N              | Valid   | 5                            | 5                           | 5                       | 5                            |
|                | Missing | 0                            | 0                           | 0                       | 0                            |
| Mean           |         | 221683917318.6000            | 45543884490.2000            | 1745092.8000            | 516593466789.2000            |
| Median         |         | 206146187700.0000            | 45631411394.0000            | 1745675.0000            | 516757143544.0000            |
| Mode           |         | 191631105712.00 <sup>a</sup> | 42989558016.00 <sup>a</sup> | 1718462.00 <sup>a</sup> | 482740174377.00 <sup>a</sup> |
| Std. Deviation |         | 37208233957.56944            | 2435557267.00124            | 23063.93373             | 32451611638.59646            |
| Variance       |         | 1384452674241223500000.0000  | 5931939200842525700.0000    | 531945039.2000          | 1053107097942289300000.0000  |
| Range          |         | 90717507899.00               | 5302650966.00               | 61553.00                | 85016714585.00               |
| Sum            |         | 1108419586593.00             | 227719422451.00             | 8725464.00              | 2582967333946.00             |

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

## Frequency Table

### Pajak Daerah

|       |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 191631105712.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | 196835027083.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 40.0               |
|       | 206146187700.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 60.0               |
|       | 231458652487.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 80.0               |
|       | 282348613611.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 100.0              |
|       | Total           | 5         | 100.0   | 100.0         |                    |

### Retribusi Daerah

|       |                | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 42989558016.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | 43211935541.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 40.0               |
|       | 45631411394.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 60.0               |
|       | 47594308518.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 80.0               |
|       | 48292208982.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 100.0              |
|       | Total          | 5         | 100.0   | 100.0         |                    |

### Jumlah Penduduk

|       |            | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1718462.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | 1731731.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 40.0               |
|       | 1745675.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 60.0               |
|       | 1749581.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 80.0               |
|       | 1780015.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 100.0              |

|       |   |       |       |
|-------|---|-------|-------|
| Total | 5 | 100.0 | 100.0 |
|-------|---|-------|-------|

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

|       |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 482740174377.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | 495691172682.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 40.0               |
|       | 516757143544.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 60.0               |
|       | 520021954381.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 80.0               |
|       | 567756888962.00 | 1         | 20.0    | 20.0          | 100.0              |
|       | Total           | 5         | 100.0   | 100.0         |                    |

### Descriptives

#### Notes

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Output Created         | 28-DEC-2024 15:00:02                                                           |
| Comments               |                                                                                |
| Input                  | Active Dataset DataSet2                                                        |
|                        | Filter <none>                                                                  |
|                        | Weight <none>                                                                  |
|                        | Split File <none>                                                              |
|                        | N of Rows in Working Data File 5                                               |
| Missing Value Handling | Definition of Missing User defined missing values are treated as missing.      |
|                        | Cases Used All non-missing data are used.                                      |
| Syntax                 | DESCRIPTIVES<br>VARIABLES=X1 X2 X3<br>Y<br>/STATISTICS=MEAN<br>STDDEV MIN MAX. |

|           |                |             |
|-----------|----------------|-------------|
| Resources | Processor Time | 00:00:00,00 |
|           | Elapsed Time   | 00:00:00,00 |

### Descriptive Statistics

|                              | N | Minimum         | Maximum         | Mean              |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Pajak Daerah                 | 5 | 191631105712.00 | 282348613611.00 | 221683917318.6000 |
| Retribusi Daerah             | 5 | 42989558016.00  | 48292208982.00  | 45543884490.2000  |
| Jumlah Penduduk              | 5 | 1718462.00      | 1780015.00      | 1745092.8000      |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 5 | 482740174377.00 | 567756888962.00 | 516593466789.2000 |
| Valid N (listwise)           | 5 |                 |                 |                   |

### Descriptive Statistics

|                              | Std. Deviation    |
|------------------------------|-------------------|
| Pajak Daerah                 | 37208233957.56944 |
| Retribusi Daerah             | 2435557267.00124  |
| Jumlah Penduduk              | 23063.93373       |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 32451611638.59647 |
| Valid N (listwise)           |                   |

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

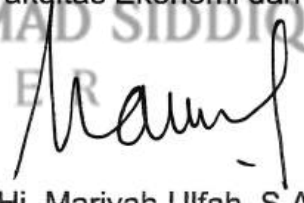
Nama : ADILLAH MIFTAHUL NI'MAH  
NIM : 214105030039  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah  
Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Banyuwangi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Maret 2025

Operator Drillbit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.El  
NIP. 197709142005012004

### **SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Adillah Miftahul Ni'mah

NIM : 214105030039

Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Februari 2025  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah,



**Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Adillah Miftahul Ni'mah  
NIM : 214105030039  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 001/004 Ds. Watukebo  
Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi  
Email : [adillahmifni@gmail.com](mailto:adillahmifni@gmail.com)  
No. Hp : 0881026870827

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 WATUKEBO (2011 – 2016)
2. SMP : SMP Unggulan Habibullah (2016 – 2018)
3. SMA : SMKN IHYA' ULUMUDIN (2018 – 2021)
4. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Achmad Siddiq Jember (2021 – 2025)